

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Kepanjen

a. Sejarah Kota Kepanjen

Kota Kepanjen berasal dari kata Panji, mendapat awalan ke- dan akhiran -an menjadi KE-PANJI-AN kemudian dikenal dengan nama Kepanjen. Artinya, tempat Panji atau Pangeran. Sejarah nama Kepanjen berawal setelah pertempuran atau perang saudara di Kerajaan Kediri salah seorang Panji melarikan diri ke daerah Malang Selatan yang akhirnya disebut Jenggolo. Kemudian Panji di Jenggolo berkembang menjadi besar dan menjadi daerah Ke-Panji-an atau dikenal dengan sebutan KEPANJEN (masih berdarah Mataram).

b. Kondisi Geografis dan Administrasi

Kecamatan Kepanjen merupakan salah satu wilayah Kabupaten Malang yang terletak di sebelah selatan Kota Malang dengan jarak ± 18 km. Kecamatan Kepanjen terletak pada titik koordinat $112^{\circ}17'10,9''$ - $112^{\circ}57'00''$ Bujur Timur dan $7^{\circ}44'55,11''$ - $8^{\circ}26'34,45''$ Lintang Selatan.

Wilayah Kecamatan Kepanjen memiliki batas-batas:

- Sebelah Utara Kecamatan Pakisaji
- Sebelah Timur Kecamatan Gondanglegi dan Bululawang
- Sebelah Selatan Kecamatan Pagak

- Sebelah Barat Kecamatan Kromengan dan Ngajum
Kecamatan Kepanjen mempunyai luas wilayah 4.469,683 Ha dengan wilayah administrasi meliputi 18 Desa/Kelurahan.

Tabel 1
Pembagian Wilayah Administrasi di Kecamatan Kepanjen

Wilayah Administrasi	Jumlah
Kelurahan	4
Desa	14
Dusun	40
RW	77
RT	467

Sumber: Kecamatan Kepanjen

c. Kondisi Topografis

Secara topografis wilayah Kecamatan Kepanjen, sebagian besar merupakan dataran yang rata-rata kemiringan tanahnya berkisar antara 0-10 %, hanya bagian di sekitar Daerah Aliran Sungai yang kondisinya curam dengan rata-rata kemiringan tanahnya 30-40 %. Ketinggian dataran Kepanjen rata-rata \pm 350 M diatas permukaan air laut. Jenis tanah yang ada yaitu admiral, gomosal, iritasol dan mediteran.

d. Kondisi Hidrologi

Wilayah Kecamatan Kepanjen dilalui oleh beberapa sungai besar dan kecil seperti: sungai Sukun, sungai Metro, sungai Petung, sungai Babar, sungai Molek, dll yang melintasi dalam kota maupun di sekitaran batas kota. Pada umumnya aliran sungai dimaksud difungsikan untuk

memenuhi berbagai kepentingan penduduk setempat, seperti saluran pematusan air hujan, MCK, pengairan air sawah, dll. Untuk daerah tertentu seperti Desa Curungrejo, sebagian Desa Sukoraharjo, sebagian Desa Jatirejoyoso dan sebagian Desa Mojosari kedalaman air bawah tanah mencapai ± 60 M dibawah permukaan tanah dengan kondisi tanah berbatu sehingga untuk daerah tersebut dulunya merupakan daerah yang sulit akan air bersih.

e. Kepadatan Jumlah Penduduk

Kecamatan Kepanjen memiliki jumlah penduduk sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 adalah 100.363 jiwa dengan rincian 49.919 jiwa laki-laki dan 50.444 jiwa perempuan. Untuk lebih jelas tentang kondisi kepadatan penduduk Kecamatan Kepanjen sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 dapat digambarkan dalam Tabel rekapitulasi Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kecamatan Kepanjen sebagai berikut:

Tabel 2
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Kepadatan
Tahun 2011

JUMLAH PENDUDUK						
No	Desa	Luas (Km ²)	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
1	Curungrejo	3.25	2.339	2.366	4.705	1.447,69
2	Dilem	2.16	2.530	2.502	5.032	2.329,62
3	Jatirejoyoso	3.02	2.371	2.287	4.658	1.542,38
4	Mojosari	2.25	1.663	1.722	3.385	1.504,44
5	Ngadilangkung	2.83	3.263	3.248	6.511	2.300,70
6	Talangagung	2.62	3.298	3.370	6.668	2.545,03
7	Ardirejo	1.83	2.887	2.999	5.886	3.216,39
8	Cepokomulyo	1.68	3.485	3.531	7.016	4.176,19
9	Jenggolo	3.00	2.551	2.585	5.136	1.712
10	Kedung Pedaringan	2.20	1.741	1.603	3.344	1520
11	Kemiri	2.07	1.768	1.821	3.589	1.733,81
12	Kepanjen	2.65	6.352	6.548	12.900	4.867,92
13	Mangunrejo	4.19	2.568	2.531	5.099	1.216,94
14	Panggungrejo	3.17	3.826	3.818	7.644	2.411,35
15	Penarukan	1.24	2.528	2.785	5.313	4.284,67
16	Sengguruh	1.32	1.858	1.969	3.827	2.899,24
17	Sukoraharjo	2.68	3.466	3.375	6.841	2.552,61
18	Tegalsari	2.47	1.425	1.384	2.809	1.137,24
JUMLAH			49.919	50.444	100.363	43.398,22

Sumber: Kecamatan Kepanjen

f. Karakteristik Transportasi Kota

Sistem transportasi Kota Kepanjen yang disajikan meliputi prasarana transportasi dan sarana transportasi. Kota Kepanjen memiliki prasarana transportasi cukup bagus, mengingat Kota Kepanjen merupakan jalur yang strategis, dimana jalur dimaksud merupakan jalur poros penghubung dari Kota Malang ke wilayah Kabupaten Blitar, arah ke Timur menuju ke wilayah Kabupaten Lumajang melewati Kecamatan Gondanglegi, Turen dan Dampit, sedang ke arah Selatan menuju ke Kecamatan Pagak. Kondisi prasarana transportasi di kota Kepanjen yang berupa jaringan jalan pada kondisi eksisting menurut klasifikasinya berupa:

- a. Jalan kolektor primer : jalan poros utama yang menghubungkan Daerah/ Wilayah/ Kabupaten/ Kota seperti jalan poros yang menghubungkan Kota Malang ke Blitar yang melewati wilayah Kepanjen (Jl. Mojosari, Jl. Raya Ngadilangkung, Jl. A. Yani, Jl. Kawi – Talangagung).
- b. Jalan Lokal Primer : jalan poros yang mempunyai fungsi ganda dalam struktur ruang kawasan sebagai jalan arteri yang menghubungkan pusat kota dengan pusat BWK lainnya, seperti jalan poros yang menghubungkan Kota Malang ke wilayah Kota Kepanjen (Jl. Raya Curungrejo, Jl. Raya Sukoraharjo, Jl. Penarukan, Jl. Sultan Agung, Jl. Sumedang-Sengguruh, Jl. Raya Dilem).

- c. Jalan kolektor sekunder : jalan yang menghubungkan pusat BWK dengan pusat lingkungan lainnya (Jl. Panji, Jl. Trunojoyo, Jl. Raya Penarukan, Kedungpedaringan).
- d. Jalan lokal sekunder : jalan yang menghubungkan pusat lingkungan dengan lingkungan perumahan/ perkampungan atau lingkungan perumahan/ perkampungan yang satu dengan yang lainnya (Jl. Melati, Jl. Sawo, Jl. Salak, Jl. Anggrek).

Sarana transportasi merupakan jenis kepemilikan kendaraan, di Kecamatan Kepanjen pada Tahun 2011 dapat dikelompokkan menjadi kendaraan bermotor dan kendaraan tak bermotor yang jenisnya meliputi becak, dokar/ andong, dan sepeda. Sedangkan kendaraan bermotor meliputi truk, colt/ station umum, kendaraan roda empat pribadi dan sepeda motor.

g. Karakteristik Sarana dan Prasarana Pendidikan

Prasarana pendidikan yang ada tersebar di wilayah Kecamatan Kepanjen yang terdiri dari Gedung Taman Kanak-kanak sampai Sekolah Tinggi/ Akademi.

h. Karakteristik Sarana dan Prasarana Kesehatan

Prasarana kesehatan yang ada tersebar di wilayah Kecamatan Kepanjen, yang terdiri dari fasilitas Puskesmas Pembantu, Rumah Sakit Bersalin, BKIA, Puskesmas, Poliklinik dan Rumah Sakit.

i. Karakteristik Prasarana Perdagangan dan Jasa

Kecamatan Kepanjen memiliki prasarana perdagangan dan jasa yang ada tersebar di wilayah Kecamatan Kepanjen, yang terdiri dari:

- a. pasar daerah, pasar desa dan pasar hewan
- b. perbankan, KUD dan Koperasi
- c. pertokoan dan warung yang terpusat di seputaran Jl. A. Yani, komplek Eks Kantor Pos, Jl. Sultan Agung, Jl.Kawi, Jl. Sumedang dan yang tersebar di seluruh Desa/ Kelurahan Se Kecamatan Kepanjen.
- d. Tempat Penginapan dan warung makan/ restoran

j. Karakteristik Prasarana Olah Raga

Prasarana olah raga yang ada tersebar di wilayah ini, yang terdiri dari lapangan sepak bola, lapangan badminton dan lapangan tenis. Untuk lapangan sepak bola, di kota kecamatan Kepanjen telah berdiri Stadion Kanjuruhan sebagai salah satu ikon Kota Kepanjen sebagai Ibukota Kabupaten Malang. Stadion Kanjuruhan merupakan stadion terbesar nomor dua di Indonesia dengan kapasitas 64.000 orang. Untuk lapangan badminton yang dipergunakan sebagai tempat berlatih Klub Nasional di Desa Ngadilungkung yang telah mencetak atlet Bulutangkis kelas Regional maupun Nasional.

k. Karakteristik Fasilitas Rekreasi

Fasilitas Rekreasi di wilayah Kecamatan Kepanjen terdiri dari Kolam Wisata Perairan Bendungan Sengguruh yang terletak di Desa

Sengguruh, Taman wisata Pemandian Renang Metro dan Taman Wisata Pemancingan Jati Mas di Desa Kemiri. Untuk Tempat Wisata Pemancingan Jatimas yang dibuka pada akhir tahun 2006 merupakan salah satu kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan system Penciptaan Lapangan Kerja (PLK), baik masyarakat yang direkrutmen sebagai tenaga kerja maupun masyarakat yang membuka usaha warung makan disepanjang tempat wisata pemancingan yang merupakan kerjasama antara Pemerintah Desa beserta elemen yang ada di dalamnya selaku pengelola dengan pihak PD Jasa Tirta.

1. Karakteristik Prasarana Perkantoran

Prasarana perkantoran pemerintahan yang terdapat di wilayah Kecamatan Kepanjen meliputi dua fasilitas berdasarkan fungsinya yaitu:

1. Fasilitas Pemerintahan yang berfungsi pelayanan Kabupaten Malang, seperti:
 - a. Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Malang di Jl. Panji yang terdiri dari: gedung DPRD Kab. Malang, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Lembaga Swadaya Masyarakat, Sekretariat PMI, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kepanjen.
 - b. Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Malang di Jl. Trunojoyo yang terdiri dari: Badan Pendidikan dan Pelatihan.

- c. Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan, Dinas LH, ESDM, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
 - d. Kantor Dinas Pengairan di Jl. Kawi.
 - e. Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Jl. Sultan Agung.
 - f. Kantor Kejaksaan Negeri Kapanjen dan Dinas Pertanian dan Perkebunan berada di Jl. Sumedang.
 - g. Polres Malang di Jl. A. Yani
 - h. Kantor Pengadilan Negeri Kabupaten Malang dan kantor Pengadilan Agama Kabupaten Malang berada di Jl. Panji.
2. Fasilitas Pemerintahan yang berfungsi sebagai pelayanan Kecamatan/ Kewilayahan Kapanjen seperti: Kantor Camat Kapanjen di Jl. Kawi, Kantor Koramil Kapanjen di Jl. Panji, Kantor Polsek Kapanjen di Jl. Raya Mojosari, Kantor UPTD TK, SD dan PLS, Dinas P dan K Kecamatan Kapanjen di Jl. Panji, Kantor UPTD Bina Marga Kecamatan Kapanjen di Jl. A. Yani, Kantor UPTD Stadion Kanjuruhan di Jl. Trunojoyo, kantor UPTD Terminal Talangagung Dinas Perhubungan dan Pariwisata di Jl. Raya Talangagung.

m. Karakteristik Utilitas

Kecamatan Kapanjen mempunyai karakteristik utilitas meliputi air bersih, listrik, komunikasi, drainase, pengolahan sampah/ limbah. Penyediaan air bersih di Kecamatan Kapanjen berdasarkan pengelolaan dibagi dua yaitu: pertama, penyediaan air bersih yang dikelola oleh PDAM. Jumlah penduduk yang dilayani sampai dengan sekarang ini

berkisar 80% dari seluruh penduduk Kecamatan Kepanjen. Kedua, penyediaan air bersih yang dikelola oleh masyarakat yang bersumber dari air sumur.

Distribusi pelayanan jaringan listrik di Kecamatan Kepanjen dikatakan sudah merata karena pada dasarnya semua wilayah telah mendapatkan pelayanan listrik. Sumber pembangkit tenaga listrik berasal dari Gardu Induk yang terletak di Desa Kebon Agung Kecamatan Pakisaji dan dikelola oleh PLN UPWJ Malang.

Distribusi pelayanan jaringan telepon telah menjangkau hampir seluruh Desa/ Kelurahan di Kecamatan Kepanjen. Distribusi jaringan telepon ini umumnya mengikuti jalan-jalan utama/poros di kota Kepanjen. Jumlah dan Penyebaran telepon umum sudah cukup memadai terutama di pusat Kota Kepanjen.

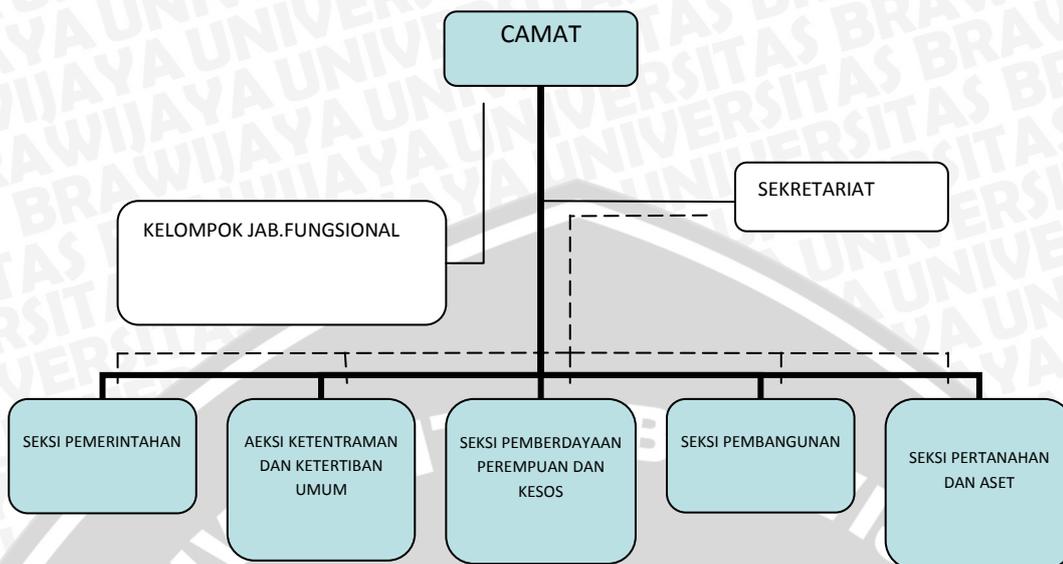
Saluran drainase di Kecamatan Kepanjen terdiri dari saluran drainase alamiah yang memanfaatkan aliran kali/sungai yang melewati Kota dan saluran-saluran drainase buatan di dalam Kota. Saluran drainase sangat penting sebagai salah satu utilitas Kota Kepanjen, hal ini dikarenakan wilayah Kepanjen yang dilewati beberapa aliran sungai besar maupun kecil yang melintas di dalam perkotaan maupun di sekitar pinggiran kota ditambah curah hujan di wilayah Kepanjen terutama untuk bulan Nopember s/d Januari cukup tinggi.

Masalah pengelolaan sampah/limbah, berdasarkan perkiraan, timbunan sampah dari daerah pemukiman dan komersil sebesar 250 m³

perhari. Sedangkan timbunan sampah dari pasar diperkirakan $\pm 40\%$ sehingga timbunan sampah secara keseluruhan diperkirakan cukup besar. Jumlah penduduk yang padat juga menghasilkan limbah domestic yang cukup besar, sehingga dikawatirkan dapat merusak kualitas air sungai yang menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat kota Kepanjen, kabupaten Malang, dan Kabupaten Kota lainnya. Pelayanan sampah dan penanganan limbah domestik ditangani oleh Dinas Pemukiman, Kebersihan Dan Pertamanan, swadaya masyarakat baik melalui Pemerintah Desa/ Kelurahan, RW dan RT maupun oleh kelompok swadaya masyarakat (KSM) dan stakeholder terkait.

n. Pemerintah Kecamatan Kepanjen

Dalam menyelenggarakan pemerintahan, aparatur pemerintah sebagai abdi Negara, dan masyarakat mempunyai peran penting menyelenggarakan berbagai tugas umum pemerintahan, tugas pembangunan, dan tugas pelayanan kepada publik atau masyarakat. Pemerintah Kecamatan Kepanjen adalah yang berperan dalam hal-hal tersebut. Berikut adalah struktur organisasi Kecamatan Kepanjen.



— = garis komando
 - - - = garis koordinasi administratif

Sumber: Kecamatan Kapanjen

Gambar 7
 Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Kapanjen

2. Gambaran Umum Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten

Malang

a. Gambaran Umum

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang terletak di jalan KH Agus Salim No. 7 Malang yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Pekerjaan Umum khususnya Cipta Karya Dan Tata Ruang. Dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dipimpin oleh kepala dinas

yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.

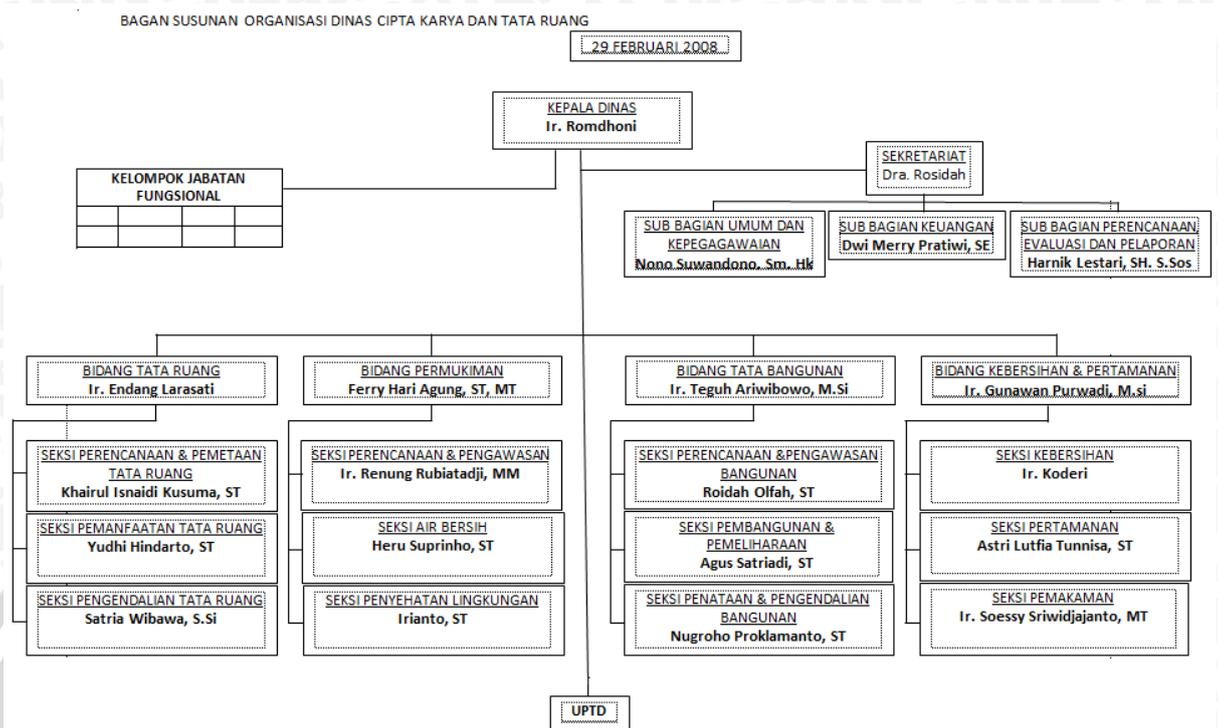
b. Struktur Organisasi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang

Struktur Organisasi merupakan suatu susunan yang dapat menunjukkan adanya pembagian tugas, alur pengkoordinasian dan alur pelaporan petanggungjawaban atas tugas/kewajiban yang dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang:

- a. Unsur pimpinan yaitu Kepala Dinas;
- b. Unsur pembantu pimpinan yaitu Bagian Tata Usaha yang terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum Dan Kepegagawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan.
- c. Unsur Pelaksanaan yaitu:
 - 1) Bidang Tata Ruang, terdiri dari:
 - a) Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruang;
 - b) Seksi Pemanfaatan Tata Ruang;
 - c) Seksi Pengendalian Tata Ruang.
 - 2) Bidang Permukiman, terdiri dari:
 - a) Seksi Perencanaan dan Pengawasan;
 - b) Seksi Air Bersih;
 - c) Seksi Penyehatan Lingkungan.

- 3) Bidang Tata bangunan, terdiri dari:
 - a) Seksi Perencanaan dan Pengawasan Bangunan;
 - b) Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan;
 - c) Seksi Penataan dan Pengendalian Bangunan.
- 4) Bidang Kebersihan dan Pertamanan, terdiri dari:
 - a) Seksi kebersihan;
 - b) Seksi Pertamanan;
 - c) Seksi Pemakaman.
- 5) Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD)
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat, Bidang, dan UPTD masing - masing dipimpin oleh seorang Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk Kepala Dinas, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut adalah bagan susunan organisasi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang.



Sumber: *Arsip Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang*

Gambar 8
Struktur Organisasi Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Malang

c. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Tupoksi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang

Visi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang adalah “Terciptanya Tata Bangunan dan Lingkungan Permukiman yang Berkualitas”.

Adapun misi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan pengelolaan ruang wilayah Kabupaten Malang yang berkualitas.
- 2) Mewujudkan pengelolaan bangunan gedung pemerintah dan masyarakat yang berkualitas.

- 3) Mewujudkan peningkatan prasarana dan sarana dasar permukiman masyarakat yang berkualitas.
- 4) Mewujudkan peningkatan kualitas kebersihan dan keasrian kawasan perkotaan yang berkualitas.

Dengan menitik beratkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang memiliki tujuan yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemanfaatan tata ruang yang berhasilguna dan berdayaguna secara optimal dan seimbang yang ditandai dengan meningkatnya kuantitas pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana peruntukan ruangnya.
- 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas bangunan gedung pemerintah yang memadai dan layak dalam melaksanakan tugas pelayanan masyarakat serta meningkatnya kualitas dan kuantitas bangunan masyarakat yang memenuhi standar teknis konstruksi bangunan.
- 3) Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman masyarakat yang ditandai oleh ketersediaan serta kecukupan prasarana dan sarana air bersih, sanitasi, drainase dan jalan lingkungan penunjang keterbatasan dari genangan banjir.
- 4) Meningkatkan kualitas kebersihan kawasan permukiman perkotaan dan predesaan serta pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kawasan perkotaan yang ditandai oleh meningkatnya kualitas dan

kuantitas pengelolaan persampahan serta pengembangan dan pemeliharaan RTH kawasan perkotaan.

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang memiliki sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Instansi Pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang adalah sebagai berikut :

- 1) Terlaksananya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian penggunaan seluruh ruang yang berada dalam lingkup wilayah Kabupaten Malang.
- 2) Terlaksananya pengelolaan bangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang yang memadai dan layak.
- 3) Terlaksananya penyediaan prasarana dan sarana dasar permukiman masyarakat yang layak.
- 4) Terlaksananya pengelolaan persampahan dan pertamanan yang berhasilguna dan berdayaguna.

Dinas Cipta Karya dan Tata ruang mempunyai tugas “Melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Cipta karya dan Tata Ruang Berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan Serta Melaksanakan Tugas-tugas Lain yang Diberikan Bupati Sesuai Bidang

Tugasnya”. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai fungsi:

- a. Pengumpulan, pengelolaan, dan pengendalian data yang berbentuk data base sergta analisi data untuk penyusunan program kegiatan;
- b. Perencanaan strategis pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;
- c. Perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum khususnya urusan cipta karya dan tata ruang;
- d. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dan bidang pekerjaan umum khususnya urusan cipta karya dan tata ruang;
- e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pekerjaan umum khususnya urusan cipta karya dan tata ruang;
- f. Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang pekerjaan umum khususnya urusan cipta karya dan tata ruang;
- g. Pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan bidang pekerjaan umum khususnya urusan cipta karya dan tata ruang;
- h. Penyelenggara kesekretariatan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;
- i. Pembinaan UPTD;
- j. Pelaksanaan fasilitasi pembangunan dan pengelolaan infrastruktur keciptakarya di perkotaan dan perdesaan;
- k. Penyusunan RUTRK/ RDTRK Perkotaan dan perdesaan, RDTRK Strategis RTBL berdasarkan skala prioritas;
- l. Pengembangan sistem informasi penataan ruang daerah;

- m. Pemberian ijin dalam rangka pemanfaatan tata ruang yang sesuai dengan RUDTRK/RDTRK Perkotaan dan Perdesaan;
- n. Penyusunan kebijakan, dan standarisasi teknis bangunan gedung termasuk pengelolaan gedung dan rumah aset daerah;
- o. Pembangunan dan pemeliharaan gedung-gedung aset daerah, pembinaan teknis dan pengawasan pembanguna dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah aset Pemerintah Daerah;
- p. Pemberian izin mendirikan banguna sesuai peruntukannya;
- q. Penyusunan kebijakan dan strategi pengembangan air bersih/ air minum, air limbah domestik(sanitasi), drainase, jalan, lingkungan;
- r. Pengembangan sistem pembiayaan dan pola investasi air minum dan sanitasi melalui kerjasama pemerintah dunia usaha dan masyarakat;
- s. Penyediaan air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin dan rawan air;
- t. Penyelenggara pembangunan prasarana dan saran air minum, sanitasi, drainase, jalan lingkungan;
- u. Pembinaan teknis dam manajemen air bersih perdesaaan;
- v. Penanggulangan dan perbaikan kerusakan infrastruktur akibat bencana alam dan kerusuhan sosial;
- w. Penetapan kebijakan pengembangan prasarana dan saran persampahan serta pengelolaan kebersihan;
- x. Penyusunan rencana induk teknis dan manajemen pengelolaan sampah;

- y. Penyelenggaraan pengolahan persampahan/kebersihan mulai dari tahap penampungan, pemindahan, pengolahan, pengangkutan, pembuangan akhir sampah;
- z. Penyelenggaraan dan pembiayaan pembangunan Prasarana dan Sarana persampahan.

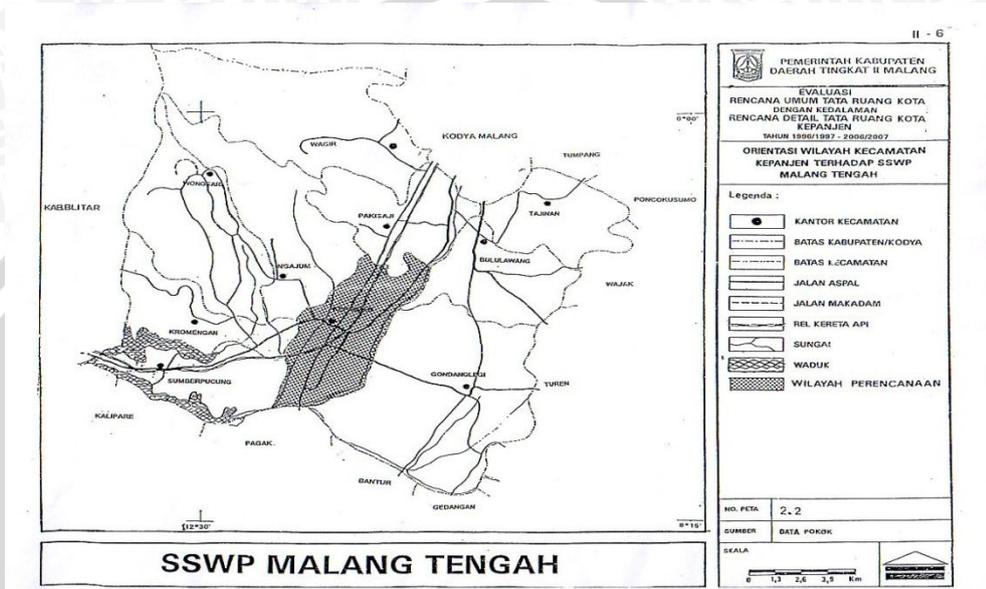
B. Penyajian Data

1. Dasar pertimbangan yang rasional dalam rangka penetapan Ibu Kota Kabupaten.

a. Aspek Strategis

Kecamatan Kepanjen merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Malang yang terpilih untuk dijadikan sebagai Ibukota Kabupaten. Hal ini dikarenakan lokasi Kecamatan Kepanjen yang cukup strategis dan memiliki kemudahan jangkauan dari lokasi menuju pusat-pusat kecamatan di wilayah Kabupaten Malang. Melalui hasil kajian terhadap letak dan aksesibilitasnya (tingkat kemudahan untuk mencapai suatu lokasi ditinjau dari lokasi lain di sekitarnya), Kepanjen yang posisinya berada di tengah Kabupaten Malang merupakan kecamatan yang memiliki orbitasi paling dekat terhadap kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Malang, sehingga layak untuk dijadikan sebagai Ibukota Kabupaten. Seperti yang disampaikan Bapak Khairul Kusuma, ST, MT selaku Kepala Seksi Perencanaan dan Pemetaan Tata Ruang,

Tengah di Kapanjen, dimana wilayah pelayanannya meliputi Kecamatan Kapanjen, Pakisaji, Wagir, Wonosari, Ngajum, Kromengan, Sumberpucung, Gondanglegi, Bululawang dan Tajinan.



Sumber: Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang

Gambar 10
Peta SSWP Malang Tengah

b. Aspek Teknis

Pemerintah Daerah Kabupaten Malang telah berusaha mewujudkan sebaik mungkin kebutuhan utilitas di Kapanjen. Hal ini dapat dilihat dari berbagai upaya penyediaan utilitas, yakni air minum, listrik, drainase, prasarana persampahan dan prasarana telekomunikasi.

1) Air minum

Pelayanan air minum untuk Perkotaan Kapanjen dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan air tanah berupa sumur yang dilakukan oleh masyarakat. Sumber air minum Perkotaan Kapanjen diperoleh

dari Umbulan sumber air Maguan, sedangkan cadangan air bersih Perkotaan Kapanjen diperoleh dari air tanah, Sungai Brantas dan Bendungan Sengguruh.



Sumber: Dokumentasi Peneliti

Gambar 11
Sungai Brantas

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan air bersih, saat ini penduduk Kapanjen banyak yang menggunakan fasilitas PDAM, terutama penduduk yang berada di dekat pusat kota Kapanjen. Penduduk yang banyak menggunakan fasilitas PDAM adalah penduduk di Kelurahan Kapanjen, Kelurahan Cepokomulyo, Kelurahan Ardirejo, Kelurahan Penarukan, dan Desa Panggungrejo. Penggunaan fasilitas PDAM tidak hanya dinikmati oleh penduduk yang berada dekat pusat kota saja, tetapi juga penduduk yang berada di wilayah pedesaan, hal ini dikarenakan pipa PDAM telah menjangkau daerah-daerah pedesaan di Kapanjen. Selain pemanfaatan fasilitas PDAM, penduduk juga menggunakan air sumur untuk memenuhi kebutuhan air bersih.

2) Listrik

Kebutuhan listrik di Perkotaan Kepanjen dilayani oleh PLN. Distribusi pelayanan jaringan listrik di Kepanjen dikatakan sudah merata dan sudah terpenuhi karena pada dasarnya jangkauan jaringan listrik di Perkotaan Kepanjen sudah mencapai ke seluruh wilayah. Sehingga untuk masa mendatang kebutuhan listrik yang perlu diperhatikan yaitu perluasan jaringan ke wilayah-wilayah permukiman baru dan penyediaan daya sesuai perkiraan kebutuhan. Kebutuhan terhadap listrik di Kepanjen tidak hanya untuk konsumsi rumah tangga, tetapi juga untuk penerangan jalan, fasilitas sosial, perdagangan dan industri. Sumber pembangkit listrik berasal dari Gardu Induk yang terletak di Desa Kebon Agung Kecamatan Pakisaji, PLTA Bendungan Sengguruh Kepanjen dan PLTA Bendungan Sutami Karangates.

3) Drainase

Penyediaan jaringan drainase di Perkotaan Kepanjen perlu ditingkatkan dengan pengadaan resapan air ke dalam tanah dan aliran drainase khususnya kualitas dan kapasitasnya, mengingat kondisi kelerengan wilayah Perkotaan Kepanjen yang relatif datar dan saluran drainase yang ada kebanyakan belum memadai dimana pada sebagian jalan utama masih belum mempunyai saluran drainase atau fungsi saluran yang belum sesuai. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Khairul Kusuma, ST, MT selaku Kepala Seksi Perencanaan dan Pemetaan Tata Ruang,

“Saluran drainase yang ada di Kepanjen kebanyakan belum memadai dimana pada sebagian jalan utama masih belum mempunyai saluran drainase atau fungsi saluran yang belum sesuai, sedangkan volume air buangan semakin meningkat. Mengingat kota Kepanjen dijadikan sebagai Ibukota Kabupaten Malang, maka penataan ruang di Kepanjen harus benar-benar disiapkan khusus pada pembenahan saluran drainase

ini. Maka dari itu, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang selaku instansi yang melakukan penataan ruang Kota Kepanjen akan berusaha membenahi prasarana drainase dengan cara melakukan perbaikan/normalisasi jaringan yang telah ada secara berkala meliputi: Peningkatan mutu konstruksi saluran drainase khususnya pada saluran drainase di jalan – jalan utama serta membersihkan saluran drainase dari sampah dan timbunan tanah dengan pengerukan” (wawancara pada tanggal 14 Pebruari 2012, pukul 10.25 WIB).

Di kawasan Jalan Trunojoyo, saluran drainase nampak sempit dan kedalamannya kurang sesuai. Apabila hujan saluran drainase ini tidak dapat menampung kapasitas air yang begitu banyak, sehingga di Jalan Trunojoyo sering terjadi banjir.



Sumber: Dokumentasi Peneliti

Gambar 12

Saluran Drainase di Kawasan Pemerintahan Jl. Trunojoyo Kepanjen

4) Prasarana Persampahan

Saat ini volume sampah yang dihasilkan di Perkotaan Kepanjen semakin meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk. Dalam usaha mengatasi masalah sampah di Kepanjen terbagi menjadi beberapa cara penanggulangan seperti pembuangan dengan menggunakan bak sampah, TPS, dibakar dan dimasukkan ke lubang. Pembuangan sampah dengan cara

menggunakan bak dilakukan oleh seluruh kelurahan dan Desa di Kecamatan Kepanjen, untuk pembuangan sampah sementara menggunakan tempat pembuangan sementara (TPS) yang terdapat di Kelurahan Kepanjen, Kelurahan Cepokomulyo dan Kelurahan Ardirejo. Sedangkan tempat Pembuangan Akhir (TPA) berada di Desa Talangagung.

TPA yang terletak di Desa Talangagung Kepanjen ini cukup mengatasi permasalahan banyaknya sampah yang dihasilkan dari kegiatan di perkotaan Kepanjen. Bahkan TPA ini menerima pasokan sampah dari berbagai Kecamatan sekitar Kepanjen yaitu Sumber Pucung, Pakisaji, dan Pagak. Hal ini diperjelas oleh Bapak Ir. Koderi selaku Kepala Seksi Kebersihan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang.

“Banyaknya volume sampah yang dihasilkan di Kepanjen dan daerah sekitarnya tidak menjadi suatu permasalahan. Saat ini di Desa Talangagung Kepanjen telah dibangun TPA yang merupakan tempat pengolahan sampah akhir, dimana sampah yang awalnya merupakan barang tidak berguna, kini diolah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Sampah organik dan non organik disortir/dipilah-pilah sebelum dilakukan pengolahan. Untuk sampah organik diolah hingga menjadi gas metan yang dapat digunakan sebagai bahan bakar. Jadi, banyaknya volume sampah yang dihasilkan di kepanjen maupun daerah sekitar tidak lagi menjadi masalah karena pengolahannya yang ramah lingkungan” (Wawancara pada hari Selasa, 14 Pebruari 2012, pukul 13.00 WIB).



Sumber: Dokumentasi Peneliti

Gambar 13
TPA Desa Talangagung Kepanjen

Pembuangan sampah dengan secara dibakar dilakukan oleh hampir seluruh desa dan kelurahan, kecuali Kelurahan Ardirejo dan Desa Tegalsari sedangkan pembuangan sampah dengan cara memasukkan ke dalam lubang dilakukan oleh hampir seluruh Desa dan Kelurahan kecuali Kelurahan Ardirejo.

5) Prasarana Telekomunikasi

Arahan untuk pengembangan jaringan telepon di Kepanjen cenderung ke peningkatan mutu pelayanan dan penambahan fasilitas komunikasi umum. Saat ini perkembangan teknologi selular telah mendominasi sistem komunikasi antar orang, dimana teknologi ini menggunakan ruang telekomunikasi udara. Berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang Kota Kepanjen, untuk meningkatkan mutu pelayanan bagi masyarakat Kepanjen,

maka akan dibangun menara untuk pemasangan antenna transceiver yang dikenal sebagai Base Transfer Station (BTS). BTS pada umumnya dibangun pada tempat-tempat dengan elevasi yang lebih tinggi untuk menjangkau pelanggan seluas mungkin. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Khairul Kusuma ST, MT, Kepala Seksi Perencanaan dan Pemetaan Tata Ruang di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang:

“Untuk peningkatan mutu pelayanan di bidang telekomunikasi maka akan dibangun menara/tower yang dikenal dengan nama BTS. Penggunaan tower/menara dikendalikan menjadi satu menara dan digunakan secara bersama dari berbagai operator dalam rangka efisiensi ruang udara dan jumlah tower. Mengingat kondisi ruang Kapanjen yang saat ini semakin padat, maka diperlukan efisiensi pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi. Konsep sistem pelayanan BTS adalah : Jangkauan pelayanan maksimal (pada daerah layanan padat per antena BTS diarahkan mendekati (+) 3 km, jarak antar tower minimum (antar provider yang tergabung dalam tower pemanfaatan bersama) diarahkan mendekati 6 Km, untuk penguatan spektrum layanan dapat menggunakan antena transmiter yang dapat ditempatkan pada mini tower, gedung tinggi, dengan disamakan menyesuaikan karakteristik estetika kawasan.”
(Wawancara pada hari Selasa, 14 Pebruari 2012, pukul 10.15 WIB).

c. Aspek Administratif

Ditinjau dari Aspek administratif, Sebagai Ibukota Pemerintahan Kabupaten Malang, Kota Kapanjen diharuskan memiliki kemudahan pengelolaan dalam pembangunannya, kemampuan pembiayaan, aspek hukum, hankamnas dan sebagainya. Ditinjau dari aspek hukum, Kapanjen telah memiliki Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Berbasis GIS (*Geographic Information System*) yang merupakan rencana pemanfaatan ruang kota secara terperinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota. Selain itu,

terkait dengan diputuskannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Malang dari Wilayah Kota Malang ke Wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang serta perkembangan Perkotaan Kepanjen yang diatur dalam RTRW Kabupaten Malang tahun 2009 – 2029 telah menunjukkan bahwa pada 20 tahun yang akan datang Perkotaan Kepanjen diprediksikan memiliki perkembangan yang signifikan.

Ditinjau dari kemudahan pengelolaannya, kondisi infrastruktur Kota Kepanjen saat ini terutama infrastruktur pemerintahan dan pelayanan public sudah disiapkan dan tersedia. Sebelum ditetapkannya Kepanjen sebagai Ibukota Pemerintahan Kabupaten Malang, di Kepanjen telah dibangun Gedung DPR Kabupaten Malang. Saat ini telah tersedia berbagai infrastruktur seperti block office, kantor bupati, kantor wakil bupati, dinas dan berbagai gedung perkantoran lainnya, termasuk rumah dinas bupati serta wakil bupati, sport center “Stadion Kanjuruhan”, dan Islamic center. Dari segi pembiayaan, berdasarkan RTRW Kabupaten Malang No.3 Tahun 2010, untuk pembiayaan ditetapkannya fungsi kawasan Perkotaan Kepanjen sebagai Ibukota Kabupaten Malang yaitu menggunakan sumber dana APBD Provinsi dan APBD Kabupaten. Sedangkan pembiayaan untuk pengembangan atau peningkatan fungsi Perkotaan Kepanjen sebagai Ibukota Kabupaten Malang juga menggunakan dana yang bersumber dari APBD Provinsi dan APBD. Dari segi hankamnas di Kepanjen terdapat kawasan militer Yon Zipur 5 di Desa Panggungrejo.

Dari penjabaran diatas lebih di perjelas lagi oleh Bapak Khairul Kusuma ST, MT selaku Kepala Seksi Perencanaan dan Pemetaan Tata Ruang di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang, beliau menyatakan bahwa:

“Ditetapkannya Kepanjen sebagai Ibukota Kabupaten Malang tentu saja sudah dipertimbangkan dalam kemudahan pengelolaannya yaitu infrastruktur yang mendukung. Sebelum ditetapkan sebagai Ibukota Kabupaten di tahun 2008, sudah dibangun gedung DPRD Kabupaten Malang yang terletak di Jalan Panji Kecamatan Kepanjen. Sedangkan dari aspek hukum, yang terpenting adalah telah dibuat Rencana Detail Tata Ruang Kota Kepanjen sebagai acuan perwujudan ruang dalam rangka pembangunan Kepanjen dimasa yang akan datang” (Wawancara pada hari Rabu, 15 Pebruari 2012, pukul 09.30 WIB).

d. Aspek Politik

Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Malang dari Kota Malang ke wilayah Kecamatan Kepanjen tidak terlepas dari sisi politik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2008 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Malang dari Wilayah Kota Malang ke Wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, menjelaskan bahwa Kecamatan Kepanjen layak untuk dijadikan Ibu Kota Kabupaten Malang (ditinjau dari sisi: dukungan lahan, sarana prasarana, rentang kendali pemerintahan, dukungan masyarakat, pelayanan masyarakat, aset, dan pengembangan ke masa depan). Terutama pada pengembangan ke masa depan di wilayah Kepanjen berpotensi dalam pengembangan yang berbasis pada sumber daya ekonomi. Seperti yang disampaikan oleh salah satu staf di Kantor Wakil Bupati Kabupaten Malang yaitu Saudara Arga Kuncara, A.Md;

“Banyak pertimbangan yang dilakukan sebelum menetapkan Ibukota Kabupaten, selain karena sesuai dengan RTRW kabupaten Malang, terpilihnya Kecamatan Kepanjen dikarenakan adanya potensi pengembangan sumber daya ekonomi dimasa yang akan datang. Kepanjen merupakan daerah transit ke beberapa kecamatan dan kabupaten lainnya, seperti : Malang- Pagak, Malang-Kalepare, Sumber Pucung-Malang, Blitar-Malang,dan sebagainya. Sehingga Kepanjen menjadi ramai dan sering dikunjungi oleh para penglaju. Apalagi Kepanjen juga merupakan pusat perdagangan dan jasa skala Kabupaten sehingga dapat menguntungkan para pedagang maupun penyedia jasa” (Wawancara pada hari Senin, 23 Juli 2012 pukul 11.00 WIB).

Saat ini para investor mulai melirik kawasan Kabupaten Malang bagian selatan, yakni di daerah Kepanjen dan sekitarnya untuk dikembangkan menjadi kompleks perumahan dan perkantoran. Mengingat Kepanjen merupakan kawasan penting sebagai Ibu Kota Kabupaten, yang mengindikasikan ramainya interaksi bisnis dan ekonomi yang menguntungkan secara finansial bagi *stakeholder*. Misalnya proyek pembangunan infrastruktur Jalan Lingkar Barat yang melintasi Desa Mojosari-Desa Ngadilangkung-Desa Ngasem dan Desa Talangagung. Pembangunan infrastruktur seperti jalan-jalan alternatif (Jalan Lingkar Barat) dan jembatan yang semakin banyak dibangun semakin menjadi daya tarik pengembang maupun investor untuk mengembangkan usahanya di wilayah Kepanjen dan sekitarnya.

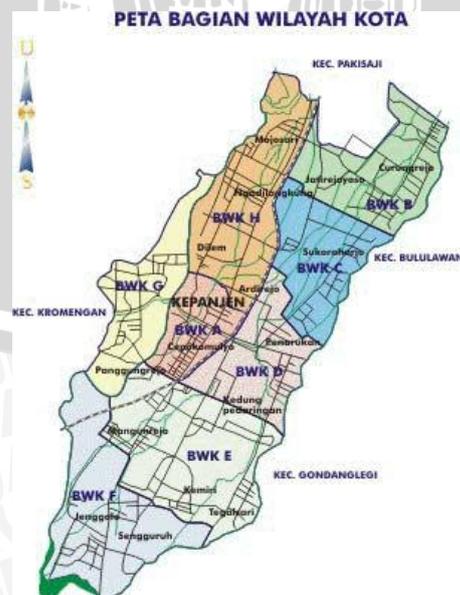
2. Struktur ruang yang memungkinkan Ibu Kota Kabupaten menjadi pusat pelayanan kegiatan dan pusat kegiatan fungsional.

a. Sebagai pusat pelayanan kegiatan.

Sebagai pusat pelayanan kegiatan, perkotaan Kapanjen dibagi menjadi 8 (delapan) BWK yang memiliki pusat kegiatan pada masing-masing BWK. Bagian wilayah kota (BWK) merupakan wilayah yang ada di dalam kawasan potensial pengembangan kota berdasarkan lingkup pelayanan tertentu. Hal ini diperjelas oleh Bapak Khairul Kusuma selaku Kasi Perencanaan dan Pemetaan Tata Ruang Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang:

“Adanya pembagian wilayah kota di Kapanjen dimaksudkan Untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pelayanan setiap kegiatan yang ada dalam bagian wilayah kota, yang merupakan upaya pemanfaatan ruang secara optimal serta memandang satu bagian wilayah kota sebagai satu kesatuan sub sistem kota yang mempunyai karakteristik yang spesifik dengan sarana dan prasarana yang sesuai untuk mendukungnya. Pembagian BWK di perkotaan Kapanjen yaitu berdasarkan struktur pusat pelayanan per unit lingkungan dan ketersediaan fasilitas umum maupun sosial. Pembagian BWK juga didasarkan pada Deliniasi yaitu pembagian berdasarkan batas wilayah/fisik dan fungsi” (Wawancara pada hari Rabu, 15 Pebruari 2012, pukul 09.00 WIB).

Adapun struktur pelayanan masing-masing BWK yang ada di Perkotaan Kapanjen sebagai berikut :



Sumber: Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang

Gambar 14
Peta Bagian Wilayah Kota Kepanjen

a. BWK A

Wilayah BWK A terdiri dari Kelurahan Kepanjen dan sebagian Kelurahan Cepokomulyo dengan luas wilayah 256,502 Ha. BWK A dibagi menjadi 2 (dua) Blok yaitu Blok A1 dan Blok A2. Dimana Blok A1 dibagi menjadi 9 Sub Blok dan Blok A2 dibagi menjadi 4 Sub Blok. Pusat BWK A terletak pada Blok A1 di sekitar Jalan Kawi dan pertemuan dengan Jalan A. Yani, Jalan Sultan Agung dan Jalan Sumedang, dengan kegiatan utama yaitu berupa kegiatan perdagangan dan jasa berskala perkotaan. BWK A merupakan pusat pelayanan di Perkotaan Kepanjen.

b. BWK B

Wilayah BWK B terdiri dari Desa Curungrejo, sebagian Desa Jatirejoyoso dan sebagian Desa Sukoraharjo dengan luas wilayah 630,510 Ha. BWK B dibagi menjadi 2 (dua) Blok yaitu Blok B1 dan Blok B2. Dimana Blok B1 dibagi menjadi 8 Sub blok dan Blok B2 dibagi menjadi 20 Sub Blok. Pusat BWK B terletak pada Blok B1 yang juga merupakan sub pusat pelayanan di Perkotaan Kepanjen. BWK B memiliki fungsi sebagai kawasan permukiman dan kawasan pertanian.

c. BWK C

Wilayah BWK C terdiri dari sebagian Desa Jatirejoso dan sebagian Desa Sukoraharjo dengan luas wilayah 494,508 Ha. BWK C dibagi menjadi 2 (dua) Blok yaitu Blok C1 dan Blok C2. Dimana Blok C1 dibagi menjadi 9 Sub

Blok dan Blok C2 dibagi menjadi 9 Sub Blok. Pusat BWK C terletak pada Blok C2 di sekitar Jalan Raya Sukoraharjo, Jalan Ketapang dan Jalan Sunan Kudus yang juga merupakan sub pusat pelayanan di Perkotaan Kepanjen. BWK B memiliki fungsi sebagai kawasan permukiman, pertanian, dan perdagangan jasa.

d. BWK D

Wilayah BWK D terdiri dari Kelurahan Penarukan dan sebagian Kelurahan Ardirejo dengan luas wilayah 494,508 Ha. BWK D dibagi menjadi 2 (dua) Blok yaitu Blok D1 dan Blok D2. Dimana Blok D1 dibagi menjadi 14 Sub Blok dan Blok D2 dibagi menjadi 21 Sub Blok. Pusat BWK D terletak pada Blok D2 di sekitar pertigaan Jalan Penarukan, Jalan Hasanudin dan Jalan Sultan Agung yang juga merupakan sub pusat pelayanan di Perkotaan Kepanjen. BWK D memiliki fungsi sebagai kawasan pusat pemerintahan/ perkantoran, kesehatan, dan permukiman

e. BWK E

Wilayah BWK E terdiri dari sebagian Desa Pangungrejo, Desa Mangunrejo, Desa Kedungpedaringan, Desa Tegalsari, sebagian Desa Jenggolo dan sebagian Desa Kemiri dengan luas wilayah 956,907 Ha. BWK E dibagi menjadi 2 (dua) Blok yaitu Blok E1 dan Blok E2. Dimana Blok E1 dibagi menjadi 21 Sub Blok dan Blok E2 dibagi menjadi 16 Sub Blok. Pusat BWK E terletak pada Blok E1 di sekitar Jalan Pangungrejo dan Jalan Kawi Desa Mangunrejo yang juga merupakan sub pusat pelayanan di Perkotaan

Kepanjen. BWK E memiliki fungsi sebagai kawasan olahraga, perdagangan dan jasa, permukiman, dan pertanian

f. BWK F

Wilayah BWK F terdiri dari Sebagian Desa Mangunrejo, Desa Jenggolo, Desa Sengguruh dan Desa Kemiri dengan luas wilayah 742,709 Ha. BWK F dibagi menjadi 2 (dua) Blok yaitu Blok F1 dan Blok F2. Dimana Blok F1 dibagi menjadi 9 Sub Blok dan Blok F2 dibagi menjadi 10 Sub Blok. Pusat BWK F terletak pada UL F2 disekitar Jalan Raya Jenggolo, Jalan Kalinyamat, Jalan Kertorejo dan Jalan Gondomono yang juga merupakan sub pusat pelayanan di Perkotaan Kepanjen. BWK F memiliki fungsi sebagai kawasan rekreasi, permukiman, dan pertanian.

g. BWK G

Wilayah BWK G terdiri dari sebagian Desa Ngadilangkung, Desa Talangagung dan Desa Panggungrejo dengan luas wilayah 504,703 Ha. BWK G dibagi menjadi 2 (dua) Blok yaitu Blok G1 dan Blok G2. Dimana Blok G1 dibagi menjadi 5 Sub blok dan Blok G2 dibagi menjadi 10 Sub blok. Pusat BWK G terletak pada Blok G1 di sekitar Jalan Gunung Kawi, Jalan Sersan Murdoyo dan Jalan Abdul Rahman Saleh yang juga merupakan sub pusat pelayanan di Perkotaan Kepanjen. BWK G memiliki fungsi sebagai kawasan permukiman dan pertanian.

h. BWK H

Wilayah BWK H terdiri dari Desa Mojosari, Desa Dilem, Desa Ngadilangkung dan sebagian Desa Ardirejo dengan luas wilayah 576,106

Ha.BWK H dibagi menjadi 3 (tiga) Blokyaitu Blok H1, Blok H2 dan Blok H3. Dimana Blok H1 dibagi menjadi 7 Sub blok, Blok H2 dibagi menjadi 16 Sub blok, dan Blok H3 dibagi menjadi 8 Sub blok. Pusat BWK H terletak pada Blok H2 di sekitar kantor Desa Dilem yang terletak di pertigaan Jalan Semeru, Jalan Bromo dan Jalan Masjid yang juga merupakan sub pusat pelayanan di Perkotaan Kepanjen. BWK H memiliki fungsi sebagai kawasan permukiman, dan pendidikan.

Dari delapan BWK A-H, tidak semuanya melaksanakan fungsi yang telah direncanakan. Mengenai pembagian BWK ini menurut Bapak Khairul Kusuma ST, MT, Kepala Seksi Perencanaan dan Pemetaan Tata Ruang di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang, mengemukakan bahwa:

“Pada setiap pusat BWK tidak kesemuanya berfungsi sesuai dengan fungsi penetapan masing-masing BWK. Fungsi pada tiap BWK bisa berubah sesuai dengan jenis & skala pelayanannya serta orientasi pergerakan penduduk dalam melakukan kegiatannya seperti kegiatan perdagangan dan sebagainya. Misalnya pada BWK A yang seharusnya hanya difungsikan sebagai pusat pelayanan dengan kegiatan utama berupa kegiatan perdagangan dan jasa, kini merangkap menjadi fungsi perumahan. Terlihat dari semakin banyaknya jumlah penduduk yang mengakibatkan bertambahnya perumahan di daerah Kepanjen, Cepokomulyo dan Penarukan.” (Wawancara pada hari Selasa, 20 Februari 2012, pukul 11.00)

Adanya ketidaksesuaian fungsi BWK menyebabkan ketimpangan/ belum meratanya perkembangan dalam wilayah Perkotaan Kepanjen sehingga perkembangan terpusat di sekitar pusat kota. Kegiatan penduduk di Perkotaan Kepanjen cenderung memusat di pusat kota yaitu BWK A, sehingga perkembangan di wilayah pusat kota lebih cepat jika dibandingkan dengan

wilayah lain di Perkotaan Kepanjen. Hal ini terjadi karena di pusat kota, terutama di sepanjang jalan utama kota, terdapat berbagai fasilitas dan jenis kegiatan yang lebih beragam. Antara lain perdagangan dan jasa, perkantoran, pendidikan, kesehatan, dan perumahan, sehingga pergerakan penduduk ke arah pusat menjadi dominan. Seperti yang disampaikan oleh salah satu warga Kepanjen yaitu Saudara Arizal Firmansyah;

“Perkembangan di pusat kota Kepanjen memang lebih cepat dibandingkan perkembangan di wilayah lain. Ada banyaknya pertokoan dan perkantoran di sepanjang jalan utama menyebabkan arah pergerakan masyarakat lebih dominan di pusat kota, apalagi akses jalan yang memadai semakin mudah masyarakat menjangkau daerah tersebut”.
(Wawancara pada tanggal 24 Juli 2013, pukul 14.30 WIB).

b. Sebagai Pusat Kegiatan Fungsional.

Struktur kegiatan fungsional terwujud dari pola persebaran kegiatan-kegiatan di sebuah wilayah. Kegiatan-kegiatan tersebut bersifat dominan atau menonjol diantara kegiatan lainnya. Struktur kegiatan ini mempunyai kaitan erat dengan pola pemanfaatan lahan yang akhirnya berpengaruh terhadap pola orientasi atau kecenderungan pergerakan masyarakat terhadap pemanfaatan fasilitas.

Berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang Kota Kepanjen, maka struktur fungsional berdasarkan fungsi dan peran Perkotaan Kepanjen yang telah ditetapkan, akan dikembangkan di wilayah Perkotaan Kepanjen meliputi:

a. Fungsi Primer

- 1) Pusat pemerintahan/ perkantoran skala Kabupaten

Pengembangan fasilitas pemerintahan/perkantoran diarahkan untuk meningkatkan pelayanan penduduk di Kabupaten Malang. Pengembangan kawasan pemerintahan/perkantoran berupa pembangunan terpadu kantor DPRD Kabupaten Malang, Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Kantor Pengadilan Negeri Kabupaten Malang, Kantor Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang dan beberapa instansi lainnya. Pengembangan perkantoran terpadu diarahkan di Desa Kedungpedaringan bagian barat, Kelurahan Penarukan dan Desa Panggungrejo sebelah timur.



Sumber: Dokumentasi Peneliti

Gambar 15

Kantor Bupati Kabupaten Malang, Jl. Panji Kepanjen

2) Perdagangan dan jasa skala regional

Pengembangan sektor perdagangan ini pada dasarnya mendudukkan Kecamatan Kepanjen sebagai pusat perdagangan bagi wilayah pengaruhnya dan untuk melayani kebutuhan pusat perbelanjaan bagi masyarakat. Perkembangan perdagangan di

Kecamatan Kepanjen dilakukan dengan melengkapi fasilitas pusat perbelanjaan pasar dan pertokoan.



Sumber: Dokumentasi Peneliti

Gambar 16
Pasar Kepanjen Sisi Depan

Jenis jasa yang ada dan berkembang pesat saat ini adalah bank dan koperasi. Untuk jenis jasa lain yang perlu dikembangkan adalah jasa yang mempunyai pelayanan skala kota seperti hotel, restoran dan sebagainya.



Sumber: Dokumentasi Peneliti

Gambar 17
Bank BNI Syariah Jl. Effendi Kepanjen

3) Kesehatan skala regional

Fasilitas Kesehatan skala regional yang sudah ada saat ini adalah RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Kabupaten Malang. Jenis fasilitas yang masih perlu pengembangan adalah posyandu dan puskesmas. Pengembangan fasilitas ini disesuaikan dengan daya dukung penduduknya sedangkan untuk rumah sakit diarahkan untuk ditingkatkan jenis pelayanannya.



Sumber: Dokumentasi Peneliti

Gambar 18
RSUD Kanjuruhan Kapanjen

4) Pendidikan tinggi

Jenis pendidikan yang dikembangkan dalam skala regional adalah SMA dan Perguruan Tinggi. Untuk jenjang SMA akan diusahakan di setiap BWK, sedangkan untuk jenjang Perguruan Tinggi ditingkatkan kualitasnya.



Sumber: Dokumentasi Peneliti

Gambar 19
STIKES Keanjen

5) Olahraga skala regional

Fasilitas olah raga skala regional di Keanjen adalah Stadion Kanjuruhan Keanjen. Pemerintah Kabupaten Malang lebih memprioritaskan pengembangan stadion Kanjuruhan yang nantinya diharapkan memiliki fasilitas yang lengkap (sport centre) dengan lingkup pelayanan kabupaten.



Sumber: Dokumentasi Peneliti

Gambar 20

Stadion Kanjuruhan Kapanen

b. Fungsi Sekunder

1) Pendidikan skala lokal

Fasilitas yang dikembangkan saat ini adalah jenis TK 48 unit, SD mencapai 62 unit, SMP 24 unit, SMA 17 unit, Madrasah, Pesantren yang merata di setiap BWK hingga jenjang Perguruan Tinggi yang berciri Islam Modern.



Sumber: Dokumentasi Peneliti

Gambar 21

SMA Negeri 1 Kapanen Jl. Ahmad Yani

2) Peribadatan

Jumlah masing-masing fasilitas peribadatan di wilayah Kapanen pada saat ini adalah masjid sebanyak 56 unit, langgar/mushola 278 unit, gereja 7 unit, dan pure 1 unit berada di Desa Curungrejo.



Sumber: Dokumentasi Peneliti

Gambar 22
Masjid Agung Baiturrahman Kepanjen

3) Kesehatan skala lokal

Jenis fasilitas yang dikembangkan sampai saat ini adalah posyandu 116 unit, puskesmas 6 unit, puskesmas pembantu 12 unit, poliklinik 12 unit, Rumah Sakit 5 unit, praktek dokter 19 unit, bidan 44 unit, mantri kesehatan 29 unit dan apotik sebanyak 12 unit. Pengembangan fasilitas ini disesuaikan dengan daya dukung penduduknya sedangkan untuk rumah sakit diarahkan untuk ditingkatkan jenis pelayanannya.



Sumber: Dokumentasi Peneliti

Gambar 23
Rumah Sakit Wawa Husada Kapanjen

4) Perdagangan dan jasa skala lokal

Fasilitas perdagangan dan jasa yang dikembangkan di wilayah Kapanjen meliputi 1 unit kawasan perdagangan yang terletak di kawasan Kelurahan Kapanjen dan Kelurahan Ardirejo, 8 unit bank desa, 1 unit pasar umum, 7 unit pasar desa, 2 unit pasar sayur, 1 unit pasar hewan, 54 unit gudang, 9 unit koperasi, dan 1 unit lumbung desa. Jenis fasilitas yang akan dikembangkan di kecamatan Kapanjen terdiri dari perdagangan seperti plaza, mall, showroom, hotel dan sebagainya.



Sumber: Dokumentasi Peneliti

Gambar 24
Kawasan Pertokoan Jl. Kawi Kapanjen

5) Rekreasi dan Olah raga

Jenis yang dikembangkan adalah stadion, lapangan olah raga, dan taman kota. Taman ini akan dikembangkan tersebar di beberapa tempat sesuai dengan hierarki pelayanannya. Lapangan olah raga

dikembangkan di bagian Selatan perkantoran. Pengembangan taman kota untuk memberikan identitas dan tempat berkumpul warga. Lokasi yang disarankan adalah pada bagian utara perkantoran di Kelurahan Penarukan. Tapi sampai saat ini pembangunan taman kota belum sempat direalisasikan. Pemerintah Kabupaten Malang lebih memprioritaskan pengembangan stadion Kanjuruhan yang nantinya diharapkan memiliki fasilitas yang lengkap (sport centre) dengan lingkup pelayanan kabupaten. Mengenai jumlah fasilitas pada akhir tahun ini adalah stadion sebanyak 1 unit, taman sebanyak 19 unit, lapangan OR 23 unit, rekreasi alam 2 unit, dan gedung OR tertutup sebanyak 8 unit.



Sumber: Dokumentasi Peneliti

Gambar 25
Aktivitas Warga Kepanjen di Halaman Luar Stadion Kanjuruhan

Untuk menunjang struktur ruang kota sebagai pusat pelayanan kegiatan dan pusat kegiatan fungsional, terdapat jaringan prasarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi yang saling memiliki

hubungan fungsional. Jaringan prasarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi yang saling memiliki hubungan fungsional yaitu sistem jaringan yang berupa Jalan Raya, Berdasarkan hierarkinya, Sistem jaringan jalan yang ada di wilayah Perkotaan Kapanjen yaitu:

1. Jalan Kolektor Primer

Jalan kolektor 1 adalah jalan kolektor primer yang menghubungkan antar Ibukota Provinsi; Jalan Kolektor 2 adalah jalan kolektor primer yang menghubungkan Ibukota Provinsi dengan Ibukota Kabupaten/Kota; serta Jalan Kolektor 3 adalah jalan kolektor primer yang menghubungkan antar Ibukota Kabupaten/ Kota. Pengembangan jalan kolektor primer di Perkotaan Kapanjen adalah :

- a) Jalan Lingkar Barat, dengan peran utama mengurangi kepadatan lalu lintas antara Malang – Kapanjen yaitu jalan mulai dari Desa Mojosari – Desa Ngadilangkung – Desa Ngasem – Desa Talangagung.



Sumber: Dokumentasi Peneliti

Gambar 26
Jalan Lingkar Barat Desa Mojosari Kapanjen

- b) Jalan Lingkar Timur, yaitu mulai dari Dawuhan – Jatrejoyoso – Ketapang – Ngadiluwih – Kedungpedaringan
- c) Jalan Lingkar Selatan (Metro II) yaitu Talangagung – Jembatan Metro II – Tulaan.

Dari ketiga jalan kolektor primer diatas pembangunan prasaran jalan yang sudah terealisasi adalah Jalan Lingkar Barat. Jalan Lingkar Barat ini masih dalam tahap pembangunan, walaupun masih dalam tahap pembangunan namun jalan ini sebagian telah dioperasikan dan arus yang melintas dari arah Malang maupun dari arah Blitar sebagian telah melintas di jalur ini. Sesuai dengan fungsi utamanya Jalan Lingkar Barat berfungsi mengurangi kepadatan arus yang berada di pusat Kota Kepanjen. Untuk Jalan Lingkar Timur dan Jalan Lingkar Utara masih dalam tahap perencanaan. Namun pihak Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang akan segera mengadakan pembangunan kedua jalan tersebut. Hal ini agar arus lalu lintas tidak hanya dialihkan ke Jalan Lingkar Barat saja, melainkan supaya bisa dialihkan ke Jalan Lingkar Selatan maupun Jalan Lingkar Timur guna mengurangi kepadatan arus lalu lintas di kawasan Kepanjen. Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Khairul Kusuma, ST, MT selaku Kepala Seksi Perencanaan dan Pemetaan Tata Ruang,

“Untuk mengurangi kepadatan arus lalu lintas di pusat Kota Kepanjen, Dinas Cipta Karya dan Tata ruang Kabupaten Malang selaku institusi penata ruang Kota Kepanjen akan membuka jaringan jalan baru yaitu Jalan Lingkar Barat, jalan Lingkar Timur dan Jalan Lingkar selatan. Namun pada saat ini jaringan jalan yang sudah dilakukan pembangunan adalah Jalan Lingkar Barat. Untuk Jalan Lingkar Timur dan Jalan Lingkar Selatan masih dalam proses perencanaan dan belum dilakukan pembangunan. Pembangunan jaringan jalan ini dilakukan

secara bertahap mengingat kondisi anggaran yang masih belum memadai untuk dilakukannya pembangunan di kedua jalan ini” (Wawancara pada tanggal 5 Maret 2012, pukul 10.30 WIB).

2. Jalan Lokal Primer

Jalan lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi. Jalan lokal primer ini pada dasarnya merupakan jalan penghubung utama antar kecamatan yang ada dan penghubung dengan fungsi utama di Kabupaten Malang yang tidak terletak di jalan arteri maupun kolektor. Jalan lokal primer di wilayah Perkotaan Kepanjen adalah Jalan Raya Panggungrejo, Jalan Raya Mangunrejo, Jalan Raya Jenggolo, dan Jalan dari Desa Sukoraharjo menuju Kecamatan Gondanglegi.



Sumber: Dokumentasi Peneliti

Gambar 27
Jalan Raya Sukoraharjo Kepanjen

3. Jalan Arteri Sekunder

Jalan arteri sekunder yaitu jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan

kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua. Jalan arteri sekunder di wilayah Perkotaan Kapanjen adalah Jalan Panglima Sudirman, Jalan A.Yani, Jalan Sumedang, Jalan Kawi, Jalan Sultan Agung, Jalan Panji, Jalan Trunojoyo, Jalan Penarukan.

Berdasarkan dari hasil penelitian bahwa jalan arteri sekunder yang terletak di Jalan A. Yani disekitar pasar Kapanjen dan Jalan Trunojoyo di sekitar Stadion Kanjuruhan terdapat salah satu permasalahan yaitu kurangnya lebar badan jalan, sehingga sering terjadi kemacetan di setiap harinya terutama pada jam kerja dan pada saat dilaksanakannya beberapa kegiatan berskala regional Kabupaten yang dipusatkan di Stadion Kanjuruhan. Seperti yang disampaikan Bapak Khairul Kusuma, ST, MT selaku Kepala Seksi Perencanaan dan Pemetaan Tata Ruang,

“Lebar badan jalan yang merupakan ruang milik jalan di Jalan A. Yani di sekitar *Central Bussiness Distric (CBD)* daerah pasar Kapanjen dan Jalan Trunojoyo disekitar Stadion Kanjuruhan memang dapat dikatakan kurang lebar. Hal ini ditandai dengan terjadinya kemacetan lalu lintas pada jam kerja kantor dan setiap dilaksanakannya kegiatan yang dipusatkan di stadion Kanjuruhan. Dalam upaya penanganan permasalahan ini Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang selaku Institusi yang melaksanakan penataan ruang Perkotaan Kapanjen mengambil langkah dengan rencana membuka jalan baru (Jalan Lingkar Barat, Jalan lingkaran Selatan, Jalan Lingkar Timur) untuk menghindari kemacetan yang terjadi, sehingga arus lalu lintas dapat dialihkan” (Wawancara pada tanggal 5 Maret 2012, pukul 10.30 WIB).

4. Jalan Kolektor Sekunder

Jalan kolektor sekunder yaitu jaringan jalan menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder

kedua dengan kawasan sekunder ketiga. Jalan kolektor sekunder di wilayah Perkotaan Kepanjen adalah Jalan Pertanian.



Sumber: Dokumentasi Peneliti

Gambar 28
Jalan Pertanian Desa Panggungrejo

5. Jalan Lokal Sekunder

Jalan lokal sekunder yaitu jaringan jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan. Jaringan jalan lokal sekunder di Perkotaan Kepanjen yaitu: Jalan Sidoutomo, Jalan Adi Santoso, Jalan Diponegoro, Jalan Raya Tegalsari, dan Jalan Kemiri.



Sumber: Dokumentasi Peneliti

Gambar 29

Jalan Adi Santoso Kelurahan Ardirejo Kapanjen

3. Pola pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukan fungsi setiap kawasan.

a. Peruntukan Ruang untuk Kawasan Lindung.

Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Penetapan kawasan lindung di Perkotaan Kapanjen termasuk pada kriteria kawasan perlindungan setempat, yaitu Kawasan Sempadan Waduk. Kawasan sekitar waduk atau bendungan adalah kawasan tertentu di sekeliling waduk atau bendungan yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi waduk atau bendungan. Adapun kriteria penetapan sempadan bendungan/waduk adalah daratan sepanjang tepian waduk/bendungan yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik bendungan/waduk antara 50-100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Waduk yang terdapat di Perkotaan Kapanjen yaitu Bendungan Sengguruh. Guna meminimasi adanya erosi dan sedimentasi pada waduk, maka perlu upaya perlindungan sepanjang sungai dari kerusakan lingkungan terutama mulai dari hulu sungai dan kawasan lindung bawahannya, mengingat bendungan ini dimanfaatkan sebagai PLTA. Pengamanan terhadap sepanjang DAS Brantas juga perlu dilakukan dengan menerapkan ketentuan-ketentuan sempadan sungai yang dilakukan secara lintas wilayah.



Sumber: Dokumentasi Peneliti

Gambar 30
Bendungan Sengguruh Kepanjen

b. Peruntukan Ruang pada Kawasan Terbangun.

1) Kawasan Perumahan/ Permukiman

Adapun kriteria dari kawasan permukiman di Kota Kepanjen adalah kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk permukiman yang aman dari bahaya bencana alam, sehat dan mempunyai akses untuk kesempatan berusaha serta dapat memberikan manfaat. Pengembangan kawasan perumahan di Kepanjen dilakukan oleh masyarakat dan para *developer*. Untuk pengembangan perumahan yang dilakukan oleh masyarakat sendiri, menyatu dengan kawasan terbangun yang sudah ada. Untuk pengembangan perumahan yang dilakukan oleh *developer* dalam skala kecil menengah (dibawah 25 Ha), maka dapat dilakukan di desa Curungrejo, Sukoraharjo, Jatirejoyoso, Dilem, dan Talangagung. Perkembangan perumahan dalam skala besar (diatas 25 Ha) diarahkan di bagian Selatan Kepanjen yakni di

Desa: Jenggolo, Kemiri bagian Utara, Mangunrejo berdekatan dengan pusat pelayanan kota dalam Skala Regional.

Pengembangan kawasan perumahan di Kepanjen diarahkan pada tiap Bagian Wilayah Kota (BWK). Pada BWK A diarahkan untuk perumahan yang dikembangkan oleh masyarakat. Kawasan perumahan pada BWK A terdiri dari Kelurahan Kepanjen dan sebagian Kelurahan Cepokomulyo dengan luas wilayah 256,502 Ha. Sedangkan pada BWK B, C, D, E, F, G, H kawasan perumahan diarahkan untuk pengembangan perumahan yang dibangun oleh *developer* dan perumahan yang dikembangkan oleh masyarakat.

Kawasan perumahan pada BWK B terdiri dari Desa Curungrejo, sebagian Desa Jatirejoyoso dan sebagian Desa Sukoraharjo dengan luas wilayah 630,510 Ha. BWK C terdiri dari sebagian Desa Jatirejoso dan sebagian Desa Sukoraharjo dengan luas wilayah 494,508 Ha. BWK D terdiri dari Kelurahan Penarukan dan sebagian Kelurahan Ardirejo dengan luas wilayah 494,508 Ha. Wilayah BWK E terdiri dari sebagian Desa Pangungrejo, Desa Mangunrejo, Desa Kedungpedaringan, Desa Tegalsari, sebagian Desa Jenggolo dan sebagian Desa Kemiri dengan luas wilayah 956,907 Ha. Wilayah BWK F terdiri dari Sebagian Desa Mangunrejo, Desa Jenggolo, Desa Sengguruh dan Desa Kemiri dengan luas wilayah 742,709 Ha. Wilayah BWK G terdiri dari sebagian Desa Ngadilangkung, Desa Talangagung dan Desa Pangungrejo dengan luas wilayah 504,703 Ha. Wilayah BWK H terdiri dari Desa Mojosari, Desa Dilem, Desa

Ngadilangkung dan sebagian Desa Ardirejo dengan luas wilayah 576,106 Ha. Realitas saat ini menempatkan pusat Kota Kepanjen menjadi pengembangan perumahan baru meskipun tidak direncanakan. Kepanjen menjadi satu-satunya penarik minat masyarakat untuk mendirikan rumahnya di daerah tersebut mengingat kawasan ini mempunyai fasilitas yang lengkap.



Sumber: Dokumentasi Peneliti

Gambar 31
Komplek Perumahan Ardirejo

2) Kawasan Pemerintahan dan Militer

Pusat kegiatan pemerintahan yang dikembangkan di kecamatan Kepanjen ialah kegiatan pemerintahan dalam skala pelayanan Kabupaten, mengingat Kota Kepanjen memiliki fungsi dan peran sebagai pusat Pemerintahan Kabupaten Malang. Pengembangan kawasan pemerintahan yang ada di wilayah Perkotaan Kepanjen diarahkan di Desa Kedungpedaringan bagian barat, Kelurahan Penarukan tepatnya di Jalan Raya Penarukan, dan Desa Panggunrejo sebelah timur.

Komplek perkantoran/instansi Pemerintah Kabupaten Malang di Desa Kedungpedaringan bagian barat terdapat di sepanjang Jalan Trunojoyo. Ada 10 instansi pemerintah Kabupaten Malang yang tersebar di daerah ini. Instansi- instansi tersebut adalah Kantor Wakil Bupati Kabupaten Malang, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Malang, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang, Unit Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Malang, Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Malang, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang, Badan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Malang, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang, dan badan Penanggulangan Bencana Daerah.



Sumber: Dokumentasi Peneliti

Gambar 32

Kawasan Instansi Pemerintahan di Jalan Trunojoyo

Kawasan pemerintahan di Desa Panggungrejo bagian timur terdapat di Jalan Panji yang terdiri dari Gedung DPRD Kabupaten Malang,

Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, Kantor Pengadilan Negeri Kabupaten Malang, Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Kantor Bupati Kabupaten Malang. Sedangkan, di Jalan Raya Penarukan terdapat Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.



Sumber: Dokumentasi Peneliti

Gambar 33
Gedung DPRD Kabupaten Malang

Kawasan militer yang ada di wilayah Perkotaan Kepanjen terdapat di Desa Pangungrejo yaitu tepatnya di Jalan Raya Panji, Jalan Melaten dan Jalan Krapyak. Mengingat lokasi ini memiliki aksesibilitas yang cukup tinggi dan sangat strategis, maka dalam keberadaannya tetap dipertahankan. Sekitar kawasan ini sebaiknya tidak digunakan untuk kegiatan yang intensitasnya tinggi. Untuk pengembangan kawasan militer dimasa yang akan datang dan mengingat keberadaan lokasi kawasan militer saat ini sudah cukup strategis, maka untuk pengembangan selanjutnya diarahkan hanya untuk pengembangan jenis perkantoran dan permukiman militer saja.



Sumber: Dokumentasi Peneliti

Gambar 34
Kawasan Militer Yon Zipur 5 Kapanjen

3) Kawasan Perdagangan dan Jasa

Kawasan perdagangan dan jasa yang terdapat di Perkotaan Kapanjen merupakan perdagangan dan jasa dengan skala lokal hingga skala regional. Terkait dengan fungsi Perkotaan Kapanjen sebagai ibukota Kabupaten Malang sehingga pengembangan perdagangan dan jasa dengan skala regional akan dikembangkan. Adapun pengembangan perdagangan dan jasa pada masing-masing BWK di Perkotaan Kapanjen yaitu pada BWK A (Kelurahan Kapanjen dan sebagian Kelurahan Cepokomulyo) merupakan pusat kegiatan di Perkotaan Kapanjen sehingga kegiatan perdagangan dan jasa berkembang dengan pesat terutama di sekitar jalan utama yaitu Jalan A Yani, Jalan Kawi, Jalan Sumedang, dan Jalan Sultan Agung. Selain itu juga terdapat Pasar Kapanjen dan Pasar Sumedang.

BWK B (Desa Curungrejo, sebagian Desa Jatirejoyoso dan sebagian Desa Sukoraharjo) memiliki fungsi primer sebagai kawasan pertanian dan permukiman, sehingga perkembangan terkait perdagangan dan jasa hanya

berupa perdagangan lokal yang melayani kebutuhan penduduk sekitar. Selain itu untuk memacu perkembangan pusat BWK B maka pengembangan perdagangan dan jasa skala BWK dikembangkan berupa pertokoan dan sentra PKL.

BWK C (sebagian Desa Jatirejoso dan sebagian Desa Sukoraharjo) memiliki fungsi primer sebagai kawasan perdagangan dan jasa, permukiman, dan pertanian. Terkait dengan fungsi tersebut maka di BWK C akan dikembangkan fasilitas perdagangan dan jasa skala regional (berupa pasar, pusat pertokoan, maupun mall) terutama untuk mengurangi beban BWK A sebagai pusat perdagangan.

Pada BWK D (Kelurahan Penarukan dan sebagian Kelurahan Ardirejo) fasilitas perdagangan dan jasa yang dikembangkan dengan skala lokal yaitu yang berada di sekitar kawasan perkantoran, kesehatan, dan permukiman penduduk. Pengembangan kawasan perkantoran dan kesehatan pada BWK D merupakan pengembangan untuk skala regional Kabupaten Malang sehingga akan menimbulkan tarikan yang cukup besar. Kondisi tersebut akan menarik munculnya PKL di sekitar daerah tersebut, oleh karena itu perlu adanya penyediaan lahan bagi PKL sehingga tidak menggunakan trotoar ataupun badan jalan yang dapat menimbulkan kesemrawutan.

Perdagangan dan jasa yang dikembangkan di BWK E (sebagian Desa Pangunrejo, Desa Mangunrejo, Desa Kedungpedaringan, Desa Tegalsari, sebagian Desa Jenggolo dan sebagian Desa Kemiri) merupakan

perdagangan skala regional yang dialokasikan pada bagian selatan dari kawasan olahraga, selain itu juga dikembangkan perdagangan dan jasa skala lokal yang berada di sekitar permukiman penduduk.

Kegiatan perdagangan dan jasa yang dikembangkan di BWK F (Sebagian Desa Mangunrejo, Desa Jenggolo, Desa Senggruh dan Desa Kemiri) berupa akomodasi wisata terutama di sekitar Bendungan Senggruh, selain melayani wisatawan di Perkotaan Kepanjen juga mengakomodasi wisatawan yang melancong di Kabupaten Malang terutama daerah Malang Selatan. Selain itu perdagangan dan jasa yang dikembangkan yaitu berupa perdagangan skala lokal yang berada disekitar permukiman penduduk.

Perdagangan dan jasa yang dikembangkan di BWK G (sebagian Desa Ngadilangkung, Desa Talangagung dan Desa Panggungrejo) berupa perdagangan dan jasa skala lokal yang berkembang disekitar permukiman penduduk. Sedangkan perdagangan dan jasa yang dikembangkan di BWK H (dari Desa Mojosari, Desa Dilem, Desa Ngadilangkung dan sebagian Desa Ardirejo) berupa perdagangan skala lokal yang dikembangkan di sekitar kawasan pendidikan tinggi dan permukiman yang akan dikembangkan.

4) Kawasan Industri

Kegiatan Industri yang ada di Kecamatan Kepanjen yaitu jenis industri rumah tangga dan industri kerajinan. Hingga saat ini masih industri rumah tangga dan kerajinan saja yang tersebar di setiap BWK. Untuk

industri berskala besar masih sebatas industri rokok “Gudang Baru” yang terletak di kawasan Kelurahan Penarukan, di desa Talangagung terdapat industri “ CV. Sinar Arto Mas” yang bergerak dalam bidang pengolahan ketela menjadi tepung, industri Kerajinan Tas dan Sepatu Kulit “Lufas” berada di Desa Ngadilangkung, selebihnya belum berkembang industri besar lain.

Untuk pengembangan kegiatan industri diarahkan di Desa Panggungrejo, Mangunrejo, dan Jenggolo dengan tetap menggunakan acuan kelestarian lingkungan. Pengembangan ini menggunakan beberapa pertimbangan antara lain tersedianya lahan yang cukup luas, terletak pada jalan regional antara Pagak-Kepanjen, dan lokasinya yang masih agak jauh dari pemukiman.



Sumber: Dokumentasi Peneliti

Gambar 35
Industri Rokok Gudang Baru

c. Peruntukan ruang pada kawasan tidak terbangun (Ruang Terbuka Hijau).

Pengembangan ruang terbuka pada dasarnya merupakan ruang yang tidak digunakan sebagai kawasan terbangun akan tetapi mempunyai kaitan langsung dengan pengembangan dan penggunaan pada kawasan terbangun. Pada RTH (Ruang Terbuka Hijau) di Perkotaan Kepanjen, pemanfaatannya lebih bersifat pengisian tanaman secara budidaya tanaman. Jalur hijau dikembangkan disepanjang jalan regional di Jalan Panj dan Jalan Trunojoyo, di seluruh pinggiran dari sungai-sungai terdapat disepanjang Jalan Raya Penarukan.

Pengembangan RTH di Perkotaan Kepanjen meliputi penyediaan makam pada masing-masing BWK sesuai dengan jumlah pertumbuhan penduduk masing-masing dimana persebaran makam tersebut disesuaikan dengan ketersediaan lahan yang ada, jalur hijau dikembangkan minimal pada jalur kolektor primer selebar 1 m dengan pembagian proporsi disesuaikan dengan kondisi yang ada, sedangkan RTH yang berupa sempadan sungai yaitu untuk perlindungan pada sungai besar di luar kawasan permukiman ditetapkan minimum 100 meter kiri-kanan sungai termasuk sungai besar di Perkotaan Kepanjen adalah Sungai Brantas dan Sungai Metro.



Sumber: Dokumentasi Peneliti

Gambar 36
RTH Sepanjang Jalan Metro Kepanjen

C. Pembahasan

1. Dasar pertimbangan yang rasional dalam rangka penetapan ibu kota kabupaten.

a. Aspek Strategis

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Malang dari wilayah Kota Malang ke wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, keberadaan Ibu Kota Kabupaten Malang yang selama ini berada di wilayah Kota Malang dianggap kurang selaras dengan kebijakan Kabupaten Malang yang sedang giat melakukan pembangunan diberbagai bidang. Oleh karena itu, berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian secara seksama dengan melibatkan *stakeholders* keberadaan Ibu Kota Kabupaten Malang yang saat ini berada di wilayah kota Malang dianggap sudah tidak sesuai dan perlu dipindahkan ke Kecamatan Kepanjen yang berada di wilayah

Kabupaten Malang agar dapat sejalan dan mengikuti pertumbuhan pembangunan yang sedang giat dilakukan. Selain itu berdasarkan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 14 ayat 1, Pemerintah Daerah Kabupaten memiliki kewenangan mengurus dan mengatur daerahnya sendiri berdasarkan asas otonomi daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Malang memiliki urusan wajib yang menjadi kewenangannya yaitu dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang Kota Kepanjen. Hal ini sesuai dengan aspek otonomi daerah yang disampaikan oleh Kartasmita dalam Pontoh dan Kustiwan (2009:204) yaitu dimensi administratif yang berkaitan dengan otonomi adalah desentralisasi. Pada dasarnya kewenangan yang lebih besar diberikan kepada daerah agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan menjadi lebih efektif dan efisien. Pembangunan yang dimaksud yaitu pembangunan dalam konteks penataan ruang Kota Kepanjen.

Sebagai Ibukota Kabupaten Malang, Kota Kepanjen dinilai strategis karena letaknya yang berada di wilayah Kabupaten Malang dan memiliki kemudahan jangkauan dari lokasi menuju pusat-pusat kecamatan di wilayah Kabupaten Malang. Hal ini sudah sesuai oleh teori yang diungkapkan oleh Ilhami (1990:38) yaitu aspek strategis yang dipertimbangkan dalam pemilihan lokasi Ibukota Kabupaten adalah:

Bahwa pemilihan lokasi Ibukota Harus mempertimbangkan Efisiensi di dalam kontrol pemerintahan, dan harus dikaitkan dengan kebijaksanaan pembangunan regional, aspek kendali pemerintahan ini menyangkut kemudahan hubungan dari lokasi menuju pusat-pusat Kecamatan atau

pusat kegiatan, sedangkan kaitannya dengan kebijaksanaan pembangunan regional adalah menyangkut pola atau strategi pengembangan kota-kota dan wilayah di Kabupaten yang bersangkutan dalam jangka waktu yang panjang.

Dari sisi efisiensi di dalam kontrol pemerintahan bahwa Kepanjen yang posisinya berada di tengah Kabupaten Malang merupakan kecamatan yang memiliki orbitasi paling dekat terhadap kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Malang, sehingga layak untuk dijadikan sebagai Ibukota Kabupaten. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan Smith (1985:67) mengenai prinsip efisiensi, bahwa suatu daerah dikatakan efisien bila daerah tersebut memiliki ukuran layanan yang efisien untuk kinerja yang optimal dan kemudahan jangkauan menuju daerah tersebut. Sedangkan dari sisi kebijaksanaan pembangunan regionalnya yaitu produk kebijakan pemerintah Kabupaten Malang yang berupa Rencana Detail Tata Ruang Kota Kepanjen (RDTRK) menetapkan bahwa Kepanjen sebagai salah satu Pusat Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP) Malang Tengah memiliki prospek pengembangan yang sangat strategis di Kabupaten Malang di masa yang akan datang. Hal ini sesuai yang dikemukakan oleh Kartasamita dalam Pontoh dan Kustiwan (2009:204), mengenai aspek keragaman dalam kebijaksanaan, yaitu kebijaksanaan pemerintah daerah benar-benar memahami karakteristik daerah dalam mempertimbangkan potensi pembangunan di daerah guna merangsang berkembangnya kegiatan ekonomi daerah.

b. Aspek Teknis

Menurut Smith (1985:74-75), sifat alami suatu daerah memiliki arti penting dalam administrasi yang ditentukan oleh ciri-ciri fisik kewilayahan. Administrasi daerah seringkali didasarkan pada wilayah geografis yaitu daerah yang merupakan satu kesatuan karakteristik. Geografi fisik merupakan dasar yang paling jelas untuk menggambarkan batas administrasi ketika pemerintah mencoba untuk mengelola sumber daya alam dengan pemanfaatan seperti penyediaan air, drainase tanah, pembuangan limbah, dan lain-lain. Dalam hal ini pemerintah berusaha memuaskan kualitas pelayanan masyarakat lokal, khususnya pelayanan perkotaan. Dalam hal ini Kepanjen sebagai Ibukota Kabupaten Malang telah berusaha mewujudkan sebaik mungkin kebutuhan utilitas di Kepanjen serta berusaha memberikan pelayanan bagi seluruh wilayah Kabupaten. Hal ini dapat dilihat dari berbagai upaya penyediaan utilitas, yakni air minum, listrik, drainase, prasarana persampahan dan prasarana telekomunikasi.

Dalam pemenuhan kebutuhan utilitas air di Kepanjen menggunakan fasilitas PDAM. Saat ini pengguna fasilitas PDAM tidak hanya dinikmati oleh penduduk yang berada di dekat pusat kota saja, tetapi juga penduduk yang berada di wilayah pedesaan juga telah dijangkau pipa PDAM.. Mengingat besarnya kapasitas air yang bersumber dari Umbulan air Maguan, maka penyediaan air dengan PDAM dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhan air di Kepanjen. Selain pemanfaatan fasilitas PDAM, penduduk juga menggunakan air sumur untuk memenuhi

kebutuhan air bersih. Begitu pula dalam hal penyediaan sarana listrik, untuk pemenuhan kebutuhan penerangan di Perkotaan Kepanjen sudah terpenuhi dengan adanya pelayanan dari PLN, dimana jangkauan jaringan listrik di Perkotaan Kepanjen sudah mencapai ke seluruh wilayah.

Untuk penyediaan utilitas yang berupa drainase, memang di sebagian kawasan perkotaan Kepanjen terutama di kawasan Jalan Trunojoyo, saluran drainase nampak sempit dan kedalamannya kurang sesuai. Namun sebagai Ibukota Kabupaten Malang, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang harus mempersiapkan sarana prasarana Kota Kepanjen dengan baik dan melakukan pembenahan khususnya saluran drainase ini, seperti yang disampaikan Bapak Khairul Kusuma, ST, MT selaku Kepala Seksi Perencanaan dan Pemetaan Tata Ruang,

“Saluran drainase yang ada di Kepanjen kebanyakan belum memadai dimana pada sebagian jalan utama masih belum mempunyai saluran drainase atau fungsi saluran yang belum sesuai, sedangkan volume air buangan semakin meningkat. Mengingat kota Kepanjen dijadikan sebagai Ibukota Kabupaten Malang, maka penataan ruang di Kepnjen harus benar-benar disiapkan khususnya pada pembenahan saluran drainase ini. Maka dari itu, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang selaku instansi yang melakukan penataan ruang Kota Kepanjen akan berusaha membenahi prasarana drainase dengan cara melakukan perbaikan/normalisasi jaringan yang telah ada secara berkala meliputi: Peningkatan mutu konstruksi saluran drainase khususnya pada saluran drainase di jalan – jalan utama serta membersihkan saluran drainase dari sampah dan timbunan tanah dengan pengerukan” (wawancara pada tanggal 14 Pebruari 2012, pukul 10.25 WIB).

Untuk prasarana persampahan, sudah disediakan TPA yang terletak di Desa Talangagung Kepanjen, TPA ini cukup mengatasi permasalahan banyaknya sampah yang dihasilkan dari kegiatan di

perkotaan Kepanjen. Sedangkan untuk pengembangan prasarana Telekomunikasi, akan dibangun menara untuk pemasangan antenna transceiver yang dikenal sebagai Base Transfer Station (BTS) untuk meningkatkan mutu pelayanan bagi masyarakat Kepanjen.

Dari penjabaran diatas, bahwa Kepanjen sebagai Ibukota Pemerintahan Kabupaten Malang mudah dijangkau oleh utilitas kota, serta menjadikan Pemerintah Kabupaten Malang serius untuk mempersiapkan berbagai fasilitas prasarana teknisnya sebaik mungkin. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Ilhami dalam bukunya yang berjudul Strategi Pembangunan Perkotaan di Indonesia (1990:38):

“Bahwa lokasi Ibukota Kabupaten harus mempunyai kemudahan teknis seperti persediaan air, listrik, drainase, prasarana persampahan, prasarana sistem telekomunikasi, persediaan tanah kosong dan lain-lain bagi terselenggaranya pembangunan dan pengembangan Ibukota Kabupaten”.

c. Aspek Administratif

Menurut Ilhami (1990:38), aspek yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan Ibukota Kabupaten ditinjau dari aspek administratif yaitu bahwa pemilihan lokasi Ibukota harus mempertimbangkan kemudahan pengelolaannya, kemampuan pembiayaan, aspek hukum, Hankamnas dan lain- lainnya. Pendapat ini sejalan dengan ditetapkannya Kepanjen sebagai Ibukota Pemerintahan Kabupaten Malang. Dimana Kota Kepanjen telah memenuhi kriteria-kriteria yang disebutkan oleh Ilhami.

Ditinjau dari aspek hukum, Kepanjen telah memiliki Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Berbasis GIS (*Geographic Information*

System) serta berdasarkan RTRW Kabupaten Malang tahun 2009 – 2029 telah menunjukkan bahwa pada 20 tahun yang akan datang Perkotaan Kepanjen diprediksikan memiliki perkembangan yang signifikan. Ditinjau dari kemudahan pengelolaannya, kondisi infrastruktur Kota Kepanjen saat ini terutama infrastruktur pemerintahan dan pelayanan publik sudah disiapkan dan tersedia. Dari segi pembiayaan, berdasarkan RTRW Kabupaten Malang No.3 Tahun 2010, untuk pembiayaan ditetapkannya fungsi kawasan Perkotaan Kepanjen sebagai Ibukota Kabupaten Malang yaitu menggunakan sumber dana APBD Provinsi dan APBD Kabupaten. Dari segi hankamnas di Kepanjen terdapat kawasan militer Yon Zipur 5 di Desa Pangungrejo.

Dari penjabaran diatas diperkuat lagi oleh pendapat Bapak Khairul Kusuma ST, MT selaku Kepala Seksi Perencanaan dan Pemetaan Tata Ruang di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang, beliau menyatakan bahwa penetapan Kepanjen sebagai Ibukota Kabupaten Malang tentu sudah dipertimbangkan dalam kemudahan pengelolaannya yaitu infrastruktur yang mendukung. Sebelum ditetapkan sebagai Ibukota Kabupaten di tahun 2008, sudah dibangun gedung DPRD Kabupaten Malang yang terletak di Jalan Panji Kecamatan Kepanjen. Sedangkan dari aspek hukum, yang terpenting adalah telah dibuat Rencana Detail Tata Ruang Kota Kepanjen sebagai acuan perwujudan ruang dalam rangka pembangunan Kepanjen dimasa yang akan datang.

d. Aspek Politik

Didalam penetapan suatu wilayah pemerintahan berdasarkan dimensi politik, suatu wilayah yang ditetapkan tersebut diartikan sebagai homogenitas ideologi politik pada suatu komunitas masyarakat yang memiliki tujuan-tujuan khusus. Smith (1985:62) dalam bukunya yang berjudul *Decentralization* menjelaskan;

“The ‘natural’ boundaries of a problem which governments may have to face are created politically, so that it becomes a matter of changing political judgement as to what the ‘right’ jurisdiction is for a particular function”

Maksud pernyataan tersebut bahwa pembatasan suatu persoalan dalam pemerintahan harus dilakukan secara politik, sehingga menjadi suatu persoalan yang menyangkut perubahan keputusan politik sebagai kewenangan/kekuasaan untuk fungsi khusus. Dalam hal ini penetapan Kota Kepanjen sebagai Ibu Kota Kabupaten Malang tidak terlepas dari aspek politik. Pemerintah didalam menetapkan Kepanjen sebagai Ibu Kota Kabupaten memiliki tujuan khusus yang berbasis pada peningkatan sumber daya ekonomi bagi wilayah Kepanjen khususnya yang berimbas pada Kabupaten Malang dalam konteks regional. Seperti yang disampaikan oleh salah satu staf di Kantor Wakil Bupati Kabupaten Malang yaitu Saudara Arga Kuncara, A.Md, bahwa terpilihnya Kecamatan Kepanjen dikarenakan adanya potensi pengembangan sumber daya ekonomi dimasa yang akan datang, apalagi Kepanjen juga merupakan pusat perdagangan dan jasa skala Kabupaten sehingga dapat menguntungkan para pedagang maupun penyedia jasa. Disisi lain Smith Juga berpendapat bahwa;

“Different criteria for delimiting governmental and administrative areas also have their own political proponents whose interests and values conflict” (1985:63).

Maksudnya adalah kriteria yang berbeda untuk pembatasan wilayah administrasi pemerintahan juga berdasar pendukung politik mereka sendiri yang memiliki kepentingan dan konflik nilai-nilai. Mengingat Kepanjen merupakan kawasan penting sebagai Ibu Kota Kabupaten Malang, dalam hal ini mengindikasikan ramainya interaksi bisnis dan ekonomi yang menguntungkan secara finansial bagi *stakeholder*.

2. Struktur ruang yang memungkinkan ibu kota kabupaten menjadi pusat pelayanan kegiatan dan pusat kegiatan fungsional.

Selama ini tata ruang kota Kepanjen mengikuti sebuah teori yang dikemukakan oleh C. D Harris dan F. L Ullman dalam Yunus (2008:47). Teori tersebut adalah Teori Inti Berganda (*Multiple Nuclei Theory*). Teori ini digunakan sebagai panutan untuk membentuk pola pada tata guna. Tata guna lahan dari wilayah kota berkembang mulai dari beberapa nukleus (inti) yang terpisah-pisah. Dalam hal ini Kepanjen dibagi menjadi 8 (delapan) BWK yang memiliki pusat kegiatan pada masing-masing BWK. Pertumbuhan di Kota Kepanjen tidak mengelilingi CBD (Pusat daerah Kegiatan) akan tetapi oleh gabungan secara bertahap dari beberapa BWK yang terpisah-pisah ke dalam struktur kota.

Dalam pelaksanaannya pola Teori Inti Berganda diterapkan pada Kota Kepanjen dimana Pusat Daerah Kegiatan (CBD) berada pada BWKA (Kelurahan Kepanjen dan sebagian Kelurahan Cepokomulyo)

yang merupakan pusat kegiatan pelayanan di Perkotaan Kepanjen dengan kegiatan utama yaitu berupa kegiatan perdagangan dan jasa berskala perkotaan. Zona perdagangan dan industri, sebagian terdapat di BWK A (Kelurahan Kepanjen dan sebagian Kelurahan Cepokomulyo) dan BWK E yaitu di sebagian Desa Panggungrejo dan Desa Mangunrejo. Untuk Zona permukiman tersebar di BWK B-H. Zona pemukiman ini meliputi perumahan skala kecil-menengah, menengah-besar.

a. Sebagai Pusat Pelayanan Kegiatan.

Untuk mengetahui struktur kegiatan pelayanan, di dalam buku yang berjudul “Pengantar Perencanaan Perkotaan”, Pontoh dan Kustiwan (2009: 236-237) mengemukakan bahwa struktur tata ruang kota pertama-pertama dapat dilihat dari adanya hierarki pusat pelayanan kegiatan kota, yakni adanya pusat kota, dan pusat sekunder/ Bagian Wilayah Kota (BWK). Berdasarkan teori ini, struktur pusat pelayanan Kota Kepanjen terbagi menjadi :

a) Pusat inti kota

Pusat inti kota terletak di pusat kecamatan Kepanjen yaitu pada BWK A yang berfungsi sebagai pusat pelayanan dengan kegiatan utama perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan wilayah kecamatan. Pusat Kecamatan Kepanjen berada pada Kelurahan Kepanjen dimana sekarang

Kelurahan Kepanjen merupakan pusat pemerintahan dan perdagangan. Fungsi ini berakibat pada padatnya perumahan dan macetnya lalu lintas kota, sehingga keadaan tersebut berpengaruh terhadap BWK di sekeliling Kelurahan Kepanjen. Hal ini ditegaskan oleh Bapak Khairul Kusuma ST, MT, Kepala Seksi Perencanaan dan Pemetaan Tata Ruang di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang, mengungkapkan bahwa adanya ketidaksesuaian fungsi BWK yang menyebabkan ketimpangan/ belum meratanya perkembangan dalam wilayah Perkotaan Kepanjen sehingga perkembangan terpusat di sekitar pusat kota. Kegiatan penduduk di Perkotaan Kepanjen cenderung memusat di pusat kota yaitu BWK A, sehingga perkembangan di wilayah pusat kota lebih cepat jika dibandingkan dengan wilayah lain di Perkotaan Kepanjen. Hal ini terjadi karena di pusat kota, terutama di sepanjang jalan utama kota, terdapat berbagai fasilitas dan jenis kegiatan yang lebih beragam. Seperti yang disampaikan Pontoh dan Kustiwan (2009:236-237), bahwa kawasan pusat kota merupakan tempat terkonsentrasinya berbagai aktivitas (sosial, ekonomi, budaya) yang melayani penduduk kota itu sendiri (lokal) dan penduduk dari wilayah yang lebih luas (regional). Agar tidak terjadi ketimpangan di pusat kota maka pada pusat pelayanan kegiatan di setiap BWK, jenis dan skala pelayanannya perlu disesuaikan dengan penduduk pendukungnya. Dengan tujuan agar dapat mengurangi ketergantungan pada pusat kota secara berlebihan karena di dalam pusat BWK tersedia

pelayanan fasilitas perkotaan sehingga tidak semua kebutuhan harus dipenuhi di pusat kota.

b) Pusat BWK: terdiri dari 8 (delapan) buah pusat BWK sesuai dengan BWK yang dimiliki yakni pusat BWK A-H.

Berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang Kota Kepanjen, struktur pelayanan Kecamatan Kepanjen diarahkan pada satu pemusatan, memanjang sepanjang jalan utama. Arah pengembangan kota ke arah Utara-Selatan Pengembangan ini diarahkan secara konsentris, karena perkembangan ini disesuaikan dengan bentuk bentang alam, potensi lokasi dan kecenderungan perkembangan kota itu sendiri. Struktur pelayanan Kota Kepanjen saat ini bila dilihat dari kawasan terbangunnya telah mengarah ke Utara dan Selatan yakni mengarah ke Kelurahan Ardirejo, Desa Dilem dan Ngadilangkung serta ke arah Kelurahan Penarukan, Desa Kedungpedaringan, dan Desa Panggunrejo. Dari kedua arahan pelayanan tersebut, arah Selatan saat ini lebih diprioritaskan pembangunannya dikarenakan pada arah Utara telah sejak dulu lebih awal dikembangkan. Untuk wilayah Kedungpedaringan dan Desa Mangunrejo, Jenggolo dan Desa Sukoraharjo seiring dengan meningkatnya kebutuhan lahan perkotaan di kota Kepanjen sekaligus dibuat untuk pengembangan kegiatan industri dengan tetap menggunakan acuan kelestarian lingkungan.

Kecamatan Kepanjen memiliki BWK A yaitu Kelurahan Kepanjen yang sangat padat akan penduduk dan kegiatan-kegiatan ekonomi yang mengikutinya. Menurut Ranoels dalam Pontoh dan Kustiwan (2009:269)

kegiatan ini digolongkan dalam sistem kegiatan rutin yaitu aspek kegiatan utama individu yang dilaksanakan seperti pergi, bekerja, belanja, sekolah dan lain sebagainya. Maka dari itu perlu didistribusikan ke wilayah yang kurang padat, yaitu BWK H Kelurahan Ardirejo dan arah selatan Kelurahan Kepanjen yakni pada BWK F dan BWK E yang meliputi Desa: Jenggolo, Kemiri bagian Utara, Mangunrejo berdekatan dengan pusat pelayanan kota dalam Skala Regional.

Kegiatan lain seperti aktivitas pendidikan yang saat ini berpusat di BWK A yaitu Kelurahan Kepanjen diupayakan pengembangannya ke arah utara yaitu di BWK H meliputi daerah Kelurahan Ardirejo, Desa Ngadilangkung dan Desa Dilem. Sedangkan untuk kegiatan perdagangan yang mulai banyak muncul di BWK A secara bertahap akan dihentikan sementara dan diarahkan ke BWK H dan BWK F sekitar daerah Panggungrejo, Mangunrejo dan Jenggolo. Upaya arahan pengembangan ke pusat BWK lain ini dengan maksud mengurangi kepadatan dan kemacetan yang terjadi di wilayah yang bersangkutan, juga pemerataan ekonomi di wilayah pengembangan yang baru.

b. Sebagai Pusat Kegiatan Fungsional

Menurut Chapin dalam Pontoh dan Kustiwan (2009:265), salah satu pendekatan dalam memahami struktur ruang kota yaitu pendekatan sistem kegiatan, pendekatan ini diartikan sebagai suatu upaya memahami pola-pola perilaku dari perorangan atau lembaga yang mengakibatkan

terciptanya pola-pola keruangan didalam kota. Pola perilaku manusia dapat diamati dari sistem-sistem kegiatan yang dilaksanakan baik oleh perorangan, badan-badan swasta maupun pemerintah. Dalam hal ini struktur kegiatan fungsional terwujud dari pola persebaran kegiatan-kegiatan di wilayah Kepanjen. Kegiatan-kegiatan tersebut biasanya bersifat dominan atau menonjol diantara kegiatan lainnya. Struktur kegiatan mempunyai kaitan erat dengan pola pemanfaatan lahan yang akhirnya berpengaruh terhadap pola orientasi atau kecenderungan pergerakan masyarakat terhadap pemanfaatan fasilitas.

Struktur kegiatan fungsional kota Kepanjen dibagi dalam 2 (dua) fungsi yaitu fungsi primer dan sekunder. Sebagai Ibukota Pemerintahan Kabupaten Malang, maka kegiatan yang berfungsi primer di Kecamatan Kepanjen dapat dikategorikan kegiatan yang melayani kota dan wilayah regionalnya (kecamatan) maupun wilayah kota-kota di sekitar Kecamatan Kepanjen, misalnya perdagangan dan jasa skala regional dan industri skala besar. Kegiatan yang berfungsi sekunder di Kecamatan Kepanjen yaitu kegiatan yang melayani penduduk Kecamatan Kepanjen dan Penduduk di wilayah sekitar kota tersebut berupa pendidikan, peribadatan, kesehatan, perkantoran, industri, perdagangan dan jasa skala lokal, militer, rekreasi/olahraga dan waduk. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Pontoh dan Kustiwan (2009: 236-237), bahwa tiap BWK memiliki pusat pelayanan kegiatan (pusat sekunder) yang jenis dan skala pelayanannya disesuaikan dengan penduduk pendukungnya.

1. BWK A sebagai pusat kota Perkotaan Kepanjen dengan fungsi sebagai kawasan perdagangan dan jasa
2. BWK B dengan fungsi sebagai kawasan permukiman dan pertanian
3. BWK C dengan fungsi sebagai kawasan permukiman, pertanian dan perdagangan jasa
4. BWK D dengan fungsi sebagai kawasan pusat pemerintahan/ perkantoran, kesehatan, dan permukiman
5. BWK E dengan fungsi sebagai kawasan pusat olahraga, militer, perdagangan dan jasa, serta pertanian
6. BWK F dengan fungsi sebagai kawasan rekreasi, pertanian, dan permukiman
7. BWK G dengan fungsi sebagai kawasan permukiman dan pertanian
8. BWK H dengan fungsi sebagai kawasan permukiman dan pendidikan

Dari delapan BWK A-H, tidak semuanya melaksanakan fungsi yang telah direncanakan. Mengenai pembagian BWK ini menurut Bapak Khairul Kusuma ST, MT, Kepala Seksi Perencanaan dan Pemetaan Tata Ruang di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang, mengemukakan bahwa pada setiap pusat BWK tidak kesemuanya berfungsi sesuai dengan fungsi penetapan masing-masing BWK. Fungsi pada tiap BWK bisa berubah sesuai dengan jenis & skala pelayanannya serta orientasi pergerakan penduduk dalam melakukan kegiatannya seperti kegiatan perdagangan dan sebagainya. Misalnya pada BWK A yang

seharusnya hanya difungsikan sebagai pusat pelayanan dengan kegiatan utama berupa kegiatan perdagangan dan jasa, kini merangkap menjadi fungsi perumahan. Terlihat dari semakin banyaknya jumlah penduduk yang mengakibatkan bertambahnya perumahan di daerah Kepanjen, Cepokomulyo dan Penarukan.

Perumahan pada skala kecil menengah yang dipusatkan pada BWK B dapat dikatakan sepi peminat dikarenakan letaknya yang jauh dari pusat kota dan memiliki suasana yang sepi. Fungsi kesehatan dan pemerintahan/perkantoran yang diarahkan pada BWK D, saat ini berpusat pada BWK G yaitu daerah Panggungrejo, sedangkan untuk pusat industri tetap berada pada BWK E dan F yakni daerah Kemiri, Tegalsari, Mangunrejo dan Sengguruh. BWK H disamping sebagai kawasan yang sedikit terbagi oleh fungsi pendidikan, di kawasan ini juga terdapat kegiatan perdagangan dan jasa dalam skala lokal.

Untuk menunjang struktur ruang kota sebagai pusat pelayanan kegiatan dan pusat kegiatan fungsional, terdapat jaringan prasarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi yang saling memiliki hubungan fungsional. Secara spesifik prasarana yang paling berpengaruh terhadap struktur tata ruang kota adalah prasarana jaringan jalan. Jaringan jalan dapat menjadi faktor yang mendorong perkembangan kegiatan, dan sebaliknya pengembangan suatu kegiatan memerlukan dukungan pengembangan jaringan jalan. Penunjukkan Kepanjen sebagai ibu kota Pemerintahan Kabupaten Malang harus disertai dengan

pembangunan infrastruktur jalan yang memadai mengingat Kepanjen sebagai pusat segala kegiatan di Kabupaten Malang.

Menurut (Pontoh dan Kustiwan, 2009: 236), wujud struktural perwujudan ruang kota diantaranya meliputi hierarki pusat pelayanan kegiatan perkotaan, seperti pusat kota, dan pusat bagian wilayah kota yang ditunjang dengan sistem prasarana jalan seperti jalan arteri, kolektor, dan lokal. Jalan raya merupakan sistem jaringan pergerakan yang sangat penting bagi perkembangan sebuah kota karena memberikan aksesibilitas sehingga dapat memenuhi kebutuhan pergerakan penduduk. Jalan raya di Kepanjen memiliki potensi untuk prospek pengembangan di masa mendatang, dilihat secara eksternal Perkotaan Kepanjen merupakan bagian dari akses Surabaya-Malang-Blitar, selain itu peningkatan kegiatan dalam skala besar dan pengembangan Perkotaan Kepanjen menjadikan beberapa jalan berpotensi untuk dilakukan peningkatan kelas jalan seperti Jalan Lingkar Timur dan Jalan Lingkar Barat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, berdasarkan hierarkinya, sistem jaringan jalan terdiri dari Jalan Kolektor Primer, Jalan Lokal Primer, Jalan Arteri Sekunder, Jalan Kolektor Sekunder, dan Jalan Lokal Sekunder. Untuk jaringan jalan yang ada di wilayah Perkotaan Kepanjen yaitu Jalan Lokal Primer, Jalan Kolektor Sekunder, dan Jalan Lokal Sekunder tidak terdapat permasalahan karena telah sesuai dengan ketentuan teknis berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

Pada Jalan Kolektor Primer di Kepanjen berupa Jalan Lingkar Barat, Jalan Lingkar Timur, dan Jalan Lingkar Selatan. Adanya jaringan jalan ini bertujuan untuk memecah arus lalu lintas di pusat kota agar dapat mengurangi kepadatan lalu lintas terutama di pusat Kota Kepanjen. Saat ini Jalan Lingkar Barat masih dalam tahap pembangunan, namun sebagian telah dioperasikan, sehingga arus yang lalu lintas yang melintasi jalur utama menuju pusat Kota Kepanjen dari arah Malang maupun Blitar dapat dialihkan ke Jalan Lingkar Barat. Pembangunan Jalan Lingkar barat ini sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan yaitu PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan menetapkan Jalan kolektor primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus. Menurut Bapak Khairul Kusuma, ST, MT selaku Kepala Seksi Perencanaan dan Pemetaan Tata Ruang, Untuk Jalan Lingkar Timur dan Jalan Lingkar Selatan pembangunannya masih belum terealisasi, pengembangan jalan ini masih dalam tahap perencanaan. Mengingat Kepanjen saat ini telah menjadi Ibu Kota Kabupaten Malang, maka kepadatan arus lalu lintas di pusat kota semakin meningkat. Sebaiknya Pemerintah Kabupaten Malang didampingi Dinas Cipta Karya dan tata Ruang Kabupaten Malang segera merealisasikan pembangunan Jalan Lingkar Timur dan Jalan Lingkar Selatan agar maka kepadatan arus lalu lintas di pusat kota dapat segera teratasi.

Untuk jalan arteri sekunder yang terletak di Jalan A. Yani disekitar pasar Kepanjen dan Jalan Trunojoyo di sekitar Stadion Kanjuruhan

terdapat salah satu permasalahan yaitu kurangnya lebar badan Jalan. Untuk Ketentuan teknis tentang jalan Arteri Sekunder dijelaskan dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, yang memaparkan bahwa Jalan arteri sekunder didesain berdasarkan kecepatan paling rendah 30 (tiga puluh) km/ jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 11 (sebelas) meter. Lebar badan jalan di Jalan A. Yani sekitar pasar Kepanjen dan di Jalan Trunojoyo memiliki lebar badan jalan yang kurang sesuai. Dengan adanya ketidaksesuaian tersebut akhirnya menimbulkan permasalahan yaitu sering terjadi kemacetan di setiap harinya terutama pada jam kerja dan pada saat dilaksanakannya beberapa kegiatan berskala regional Kabupaten yang dipusatkan di Stadion Kanjuruhan. Dalam upaya penanganan permasalahan ini Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang selaku Institusi yang melaksanakan penataan ruang Perkotaan Kepanjen akan segera mengadakan pelebaran jalan terutama di Pusat Daerah Kegiatan (CBD) sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan dalam PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

3. Pola pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukan fungsi setiap kawasan.

Ditinjau dari pola pemanfaatan ruangnya, Kota Kepanjen mengklasifikasikan kawasan pemanfaatan ruangnya menjadi 3 kawasan, diantaranya kawasan konservasi/lindung, kawasan terbangun (kawasan perumahan/permukiman, kawasan pemerintahan dan militer, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan industri), dan kawasan tidak terbangun

(RTH). Ketiga kawasan penggunaan lahan Kota Kepanjen ini sudah memenuhi Klasifikasi yang diungkapkan oleh Pontoh dan Kustiwan (2009:237), Jenis Jenis-jenis pemanfaatan ruang kawasan terbangun kota antara lain adalah kawasan perumahan, kawasan pemerintahan, kawasan perdagangan dan jasa, serta kawasan industri. Selanjutnya adalah Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang pemanfaatannya lebih bersifat pengisian hijau tanaman secara alamiah ataupun budidaya tanama. Sebagian besar klasifikasi tersebut tercantum dalam pemanfaatan ruang kota di Kepanjen.

a. Peruntukan Ruang untuk Kawasan Lindung.

Penetapan kawasan lindung di Perkotaan Kepanjen termasuk pada kriteria kawasan perlindungan setempat, yaitu Kawasan Sempadan Waduk. Kawasan sekitar waduk atau bendungan adalah kawasan tertentu di sekeliling waduk atau bendungan yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi waduk atau bendungan. Waduk yang terdapat di Perkotaan Kepanjen yaitu Bendungan Sengguruh yang berada di Desa Sengguruh.

Mengingat Bendungan sengguruh dimanfaatkan sebagai PLTA, maka perlu upaya perlindungan sepanjang sungai dari kerusakan lingkungan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Kawasan lindung memiliki fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan alam. Dalam hal ini kawasan sempadan waduk yang merupakan kawasan

lindung memiliki fungsi untuk mempertahankan kelestarian fungsi waduk atau bendungan.

b. Peruntukan Ruang pada Kawasan Terbangun.

Untuk kawasan perumahan di kota Kepanjen, jika dianalisis kondisinya dapat dibedakan menjadi kondisi baik, sedang, dan kurang. Pengembangan kawasan perumahan banyak dilakukan oleh masyarakat dan ada sebagian yang dilakukan oleh developer seperti kawasan perumahan di Desa Talangagung (2 lokasi) dan desa Sukoraharjo. Kondisi perumahan tersebut lebih diutamakan untuk masyarakat ekonomi sedang. Untuk perkembangan perumahan dalam skala kecil-menengah (dibawah 25 Ha), dilakukan di Desa Curungrejo, Sukoraharjo, Jatirejoyoso, Dilem, dan Talangagung. Sedangkan perkembangan perumahan dalam skala besar (diatas 25 Ha) diarahkan di bagian selatan Kepanjen yakni di Desa: Jenggolo, Kemiri bagian Utara, Mangunrejo berdekatan dengan pusat pelayanan kota. Kawasan tersebut tersebar di seluruh BWK Kecamatan Kepanjen kecuali BWK A yang sudah sangat padat dan dibatasi pembangunannya.

Kawasan perdagangan dan jasa di Kepanjen terdapat di pusat Kota yaitu di Kelurahan Kepanjen. Fasilitas perdagangan dan jasa yang mempunyai skala pelayanan regional berada pada pusat kota yaitu di Kelurahan Kepanjen dengan kondisi yang cukup baik dan mempunyai jangkauan pelayanan cukup luas. Realita ini sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Pontoh dan Kustiwan (2009:238), Kegiatan perdagangan dan jasa menjadi salah satu fungsi utama kota dalam wilayah yang lebih luas,

terkait dengan fungsi kota sebagai pusat koleksi dan distribusi bagi wilayah belakangnya. Sedangkan perdagangan dengan skala lokal telah menyebar di setiap BWK dan unit lingkungan dengan kondisi sedang dan kurang. Perkembangan pertokoan skala besar di pusat kota Kepanjen diupayakan untuk dibatasi karena akan menimbulkan kepadatan dan bisa menurunkan kualitas ruang.

Kawasan perkantoran/instansi Pemerintah Kabupaten Malang terdapat di Desa Kedungpedaringan bagian barat terdapat di sepanjang Jalan Trunojoyo kawasan depan Stadion Kanjuruhan, ada 10 instansi pemerintah Kabupaten Malang yang tersebar di daerah ini. Selain itu Kawasan pemerintahan juga terdapat di Desa Panggungrejo bagian timur di Jalan Panji dan di Jalan Raya Penarukan. Mengingat pusat Pemerintahan Kabupaten Malang berada di kota Kepanjen maka banyak fasilitas perkantoran yang terdapat di Kota Kepanjen. Untuk Kawasan militer di wilayah Perkotaan Kepanjen terdapat di Desa Panggungrejo. Seperti teori yang diungkapkan oleh Pontoh dan Kustiwan (2009:238), bahwa kawasan perkantoran dikotakota keberadaannya adalah untuk mewedahi kegiatan sektor jasa; jasa pribadi, jasa profesional, dan administrasi publik. Bila disimpulkan keberadaan kawasan perkantoran di Kepanjen adalah untuk mewedahi kegiatan administrasi publik mengingat Kota Kepanjen sebagai Ibukota Pemerintahan Kabupaten Malang.

Untuk fasilitas industri menyebar pada beberapa lokasi di seperti di desa Talangagung terdapat industri yang bergerak dalam bidang pengolahan

ketela menjadi tepung, industri Kerajinan Tas dan Sepatu Kulit yang berada di Desa Ngadilangkung, serta industri rokok di Penarukan yang berperan besar pada pendapatan daerah. Untuk pengembangan kegiatan industri diarahkan di Desa Panggungrejo, Mangunrejo, dan Jenggolo dengan tetap menggunakan acuan kelestarian lingkungan. Pengembangan ini menggunakan beberapa pertimbangan antara lain tersedianya lahan yang cukup luas, terletak pada jalan regional antara Pagak-Kepanjen, dan lokasinya yang masih agak jauh dari pemukiman. Dari pertimbangan tersebut, sebagian telah memenuhi kriteria yang telah dikemukakan Pontoh dan Kustiwan (2009:239), bahwa kawasan industri harus mempertimbangkan kemudahan pengembangan lahan dan aksesibilitas jalur transportasi.

c. Peruntukan ruang pada kawasan tidak terbangun (Ruang Terbuka Hijau).

Rencana pengembangan RTH di Perkotaan Kepanjen meliputi penyediaan makam/kuburan pada masing-masing BWK sesuai dengan jumlah pertumbuhan penduduk masing-masing dimana persebaran makam tersebut disesuaikan dengan ketersediaan lahan yang ada. Kawasan perkuburan ada di setiap desa dengan luas lahan yang berbeda, lahan terluas terletak di Kelurahan Kepanjen. Pelestarian ruang terbuka ini diharapkan dapat menjadikan Kepanjen menjadi Kota yang ramah lingkungan. Pemakaman merupakan ruang terbuka hijau disamping memiliki fungsi utama sebagai tempat penguburan juga memiliki fungsi ekologis yaitu sebagai daerah

resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, dan pencipta iklim mikro.

Pemanfaatan Jalur hijau di Perkotaan Kepanjen dikembangkan disepanjang jalan regional di Jalan Panji dan Jalan Trunojoyo, di seluruh pinggiran dari sungai-sungai terdapat disepanjang Jalan Raya Penarukan. Pemanfaatan RTH di Kepanjen yang didominasi dengan adanya kehijauan tumbuh-tumbuhan atau pepohonan. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Pontoh dan Kustiwan (2009:239), bahwa pemanfaatan RTH lebih bersifat pengisian hijau tanaman atau tumbuh-tumbuhan secara alamiah ataupun budidaya tanaman. Untuk ruang terbuka yang meliputi jalur hijau perlu lebih dikembangkan di seluruh pinggiran jalan guna memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika.

